

TUGAS AKHIR
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERIODE 2017-2023



Disusun Oleh:

Kintan Aulia Dewinta Sari

2022125749

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2017-2023

Disusun Oleh:

Kintan Aulia Dewinta Sari

2022125749

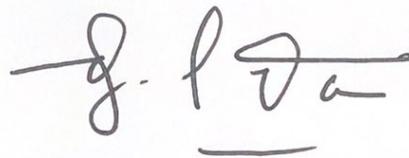
Yogyakarta, 8 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
D3 Akuntansi



Supardi, S.E., M.Sc
NIDN: 0502087801

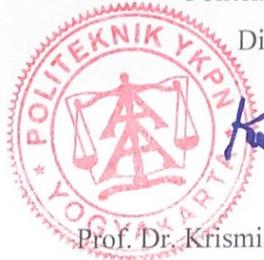


Djaja Perdana, S.Psi., SE., MT
NIDN: 0529067101

Mengetahui,

Politeknik YKPN

Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

NIDN: 0524126102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Sleman pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD dan total realisasi pendapatan daerah selama periode 2017 hingga 2023, yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas PAD, analisis pertumbuhan PAD, analisis varians PAD, dan analisis kontribusi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas PAD berada pada kategori “sangat efektif” setiap tahunnya, namun memiliki kecenderungan menurun. Sedangkan tingkat pertumbuhan PAD secara umum memiliki rasio positif dengan nilai rata-rata 7,67%, dan kecenderungan pertumbuhan mendatar. Nilai varians PAD, setiap tahun berhasil melebihi anggaran yang ditentukan atau memiliki rata-rata selisih positif, sebesar Rp70.731.522.163,63. Nilai kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, rata-rata sebesar 32.93% dengan kecenderungan bergerak mendatar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2023”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma Tiga di Politeknik YKPN Yogyakarta. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA., selaku Direktur Utama Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Nung Harjanto, SE., MAAC., Ak., CA selaku Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik YKPN Yogyakarta.
3. Bapak Djaja Perdana, S.Psi., SE., MT selaku Dosen Politeknik YKPN Yogyakarta, yang berkenan menjadi dosen pembimbing dan telah memberikan pengarahan dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir.
4. Seluruh dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir.
5. Papa, Mama, Adik, serta Tante yang telah memberikan segala dukungan, semangat, dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada orang saya sayangi, teman-teman selama kuliah dari semester satu, teman SMA Salsabila Azulfa terimakasih atas canda tawa, dukungan, memberi semangat agar lulus bersama, dan bantuan hingga akhir studi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 8 Agustus 2025

Kintan Aulia Dewinta Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir..... | 3 |
| C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir | 4 |
| D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir | 4 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA..... | 5 |
| A. Pemerintah Daerah | 5 |
| B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... | 7 |
| C. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... | 9 |
| BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI..... | 12 |
| A. Jenis Penelitian | 12 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian | 12 |
| C. Jenis dan Sumber Data Penelitian | 12 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| E. Metode Analisis..... | 13 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 16 |
| A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sleman..... | 16 |
| B. Hasil Perhitungan dan Pembahasan | 21 |
| BAB V PENUTUP | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 36 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2017-2023..... | 21 |
| Tabel 2. Data Total Pendapatan Tahun 2017-2023..... | 21 |
| Tabel 3. Hasil Analisis Efektivitas PAD tahun 2017-2023..... | 22 |
| Tabel 4. Hasil Analisis Pertumbuhan PAD tahun 2017-2023..... | 25 |
| Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis Varians PAD tahun 2017-2023..... | 29 |
| Tabel 6 . Hasil Perhitungan Analisis Kontribusi PAD tahun 2017-2023..... | 32 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Lambang Daerah Kabupaten Sleman..... | 18 |
|--|----|

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--------------------------------|----|
| Grafik 1. Efektivitas PAD..... | 22 |
| Grafik 2. Pertumbuhan PAD..... | 26 |
| Grafik 3. Kontribusi PAD..... | 32 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk berusaha lebih keras dalam meningkatkan PAD melalui sektor pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lainnya. PAD yang semakin meningkat akan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan daerah, dikarenakan banyak daerah yang masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Sebagai daerah otonom, harus memiliki kemampuan menggali dan mengelola sumber daya yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah memiliki 4 sumber, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Undang-undang tersebut merupakan pemberian kewenangan lebih besar oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola semua urusan pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan sumber daya yang dapat digunakan untuk membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi sumber daya tersebut. Tujuan dari undang-undang ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Menurut (Sidik, 2002) pajak daerah dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan penghasilan paling banyak yang dihasilkan rata-rata pada suatu daerah khususnya Kabupaten Sleman. Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mulai tahun 2010 ditetapkan menjadi pajak daerah.

Pajak bumi dan bangunan P2 tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp83 miliar dengan SPPT PBB P2 sebanyak 627.729 lembar, namun realisasi pembayarannya sebesar Rp64 miliar dengan SPPT PBB P2 terbayar sebanyak 522.850 lembar atau sebanyak 81,69%. Banyak masyarakat yang belum sadar akan pembayaran pajak kepada pemerintah atau mengesampingkan karena merasa pajak bukan hal utama untuk keberlangsungan hidupnya. Mungkin juga karena pemerintah kurang dalam memperhatikan dan kurang sosialisasi pentingnya pembayaran pajak untuk daerah.

Meskipun begitu semakin banyaknya hotel, restoran, cafe, dan pusat perbelanjaan yang berkembang pesat di daerah Kabupaten Sleman membantu menghasilkan pajak yang semakin banyak pula. Pajak hotel dan BPHTB merupakan perolehan pajak daerah yang rata-rata menghasilkan pendapatan cukup banyak dibandingkan pajak daerah yang lain. Pada tahun 2023 pajak hotel mencapai Rp138.500.000.000 dan BPHTB mencapai Rp222.000.000.000.

Sedangkan retribusi pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasinya sebesar Rp57.632.637.863 namun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp40.971.519.904, walaupun mengalami penurunan tetapi realisasinya selalu melebihi anggaran yang ditentukan meskipun tidak sebanyak pajak daerah. Penurunan tersebut terjadi kemungkinan dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan wisata, pedagang kaki lima, jasa pelayanan umum, pasar atau toko, dan lain-lain tidak beroperasi akibat pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat. Setelah dilakukan vaksinasi, masyarakat mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan, dan mulai terlihat geliat ekonomi. Sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, yaitu tumbuh sebesar 2,11%.

Tahun 2017 sampai 2023 mencakup dinamika yang penting, termasuk adanya pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, khususnya pada penerimaan daerah. Dalam kurun waktu tersebut Kabupaten Sleman mengalami berbagai perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan, serta tantangan eksternal yang turut mempengaruhi kinerja pendapatan asli daerah (PAD).

Pada awal periode capaian PAD menunjukkan kecenderungan positif seiring meningkatnya aktivitas ekonomi daerah dan optimalisasi pengelolaan potensi lokal. Namun pada tahun 2019 hingga 2021 atau pertengahan periode, menghadapi tantangan dampak dari pandemi Covid-19, mengakibatkan kondisi ekonomi terguncang bahkan kurang stabil. Terjadinya perubahan situasi tersebut yang menuntut Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan penyesuaian dalam strategi pengelolaan keuangan.

Dengan menganalisis data dalam rentang waktu yang cukup panjang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tren, tantangan dan efektifitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menyusun Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Periode 2017-2023**”.

B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan atas penjelasan latar belakang, maka kajian Tugas Akhir ini adalah mengenai realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman periode 2017-2023. Dan berfokus pada, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
2. Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
3. Varians pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
4. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Mengetahui tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
2. Mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
3. Mengetahui varians pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
4. Mengetahui berapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis
Penelitian ini untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan dalam studi di Politeknik YKPN Yogyakarta, memberikan pengalaman dalam mengkaji serta meningkatkan kemampuan penulis menganalisis data keuangan publik.
2. Manfaat bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, dapat menjadi pembanding data dengan daerah lain atau tahun yang berbeda.
3. Manfaat bagi pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana pemerintah mengelola dana publik, memberikan gambaran objektif bagi masyarakat awam pengelolaan APBD.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 6 “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Istilah Pemerintah daerah juga biasa disebut *local government* seperti yang dikatakan (Jimung, 2005), bagian dari pemerintah suatu daerah suatu negara atau bangsa yang berdaulat, yang dibentuk secara politis oleh undang-undang yang dimiliki atau badan yang menjalankan pemerintahan lokal. Badan ini memiliki otoritas untuk membuat peraturan, memungut serta memberikan layanan kepada penduduk yang ada dalam kekuasaannya.

2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD.
- b. Mengajukan rancangan perda.
- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perdatentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Pemerintah Daerah

Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan adanya hak dalam menyelenggarakan otonomi yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pemimpin daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 2, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban yaitu:

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- b. Memegang teguh dan juga mengamalkan pancasila.
- c. Melaksanakan UUD RI 1945 serta dapat memelihara keutuhan NKRI.
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- e. Membentuk dan menerapkan peraturan prundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- f. Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan juga seluruh perangkat daerah.
- g. Menerapkan suatu prinsip tata pemerintahan yang bermanfaat bagi seluruh warganya yaitu pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

- h. Menjaga etika dan norma dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan bagi daerah.
- i. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian PAD

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Purwanti & Dewi, 2014) beliau memaparkan bahwa, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang dihitung sebagai penambahan nilai kekayaan bersih selama periode tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

PAD berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. PAD mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal suatu daerah.

2. Tujuan dan Manfaat PAD

PAD bertujuan untuk memberikan daerah kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri. Manfaat dari optimalisasi PAD antara lain:

- a. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik.
- c. Mempercepat pembangunan daerah.
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi.

- e. Memberikan dukungan kepada masyarakat lokal.

3. Komponen PAD

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli atau pajak. Ini juga merupakan kontribusi wajib individu maupun organisasi kepada daerah tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Pajak yang dikenakan oleh daerah meliputi sebagai berikut:

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.
- 3) Pajak hiburan.
- 4) Pajak reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan.
- 6) Pajak parkir.
- 7) Pajak air tanah.
- 8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu. Jenis retribusi antara lain:

- 1) Retribusi Jasa Umum: Misalnya pelayanan kesehatan dan kebersihan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha: Misalnya penyewaan sarana milik daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu: Misalnya izin pendirian bangunan (IMB), izin usaha tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Ini mencakup pendapatan yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha milik daerah (BUMD), seperti dividen atau keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh BUMD.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari aset lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan tersebut merupakan sebagai berikut:

- 1) Bunga deposito.
- 2) Keuntungan selisih kurs.
- 3) Penjualan aset daerah.
- 4) Denda atau sanksi administratif.
- 5) Pendapatan dari kerjasama daerah.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD

Banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa diantaranya adalah:

- a. Potensi ekonomi daerah: semakin tinggi aktivitas ekonomi, semakin besar potensi PAD.
- b. Kebijakan fiskal dan perpajakan daerah: sistem pemungutan dan tarif pajak yang efektif.
- c. Kualitas SDM pengelola keuangan daerah: profesionalisme dan integritas aparatur sangat penting.
- d. Infrastruktur pendukung: seperti transportasi, pariwisata, dan teknologi informasi.
- e. Stabilitas sosial dan politik daerah: daerah yang ramah lingkungan biasanya memiliki PAD yang tinggi.
- f. Kondisi eksternal global dan nasional: seperti pandemi, inflasi, atau krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD.

C. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio-rasio keuangan adalah alat yang diperlukan untuk menilai kinerja pendapatan daerah secara objektif. Rasio-rasio ini membantu menganalisis sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola potensi pendapatan, menentukan tingkat efektivitas, serta menentukan tingkat pertumbuhan

pendapatan yang dicapai. Beberapa rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas PAD

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai efektivitas, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi PAD yang telah dirancang.

Efektivitas juga mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Dengan demikian, analisis ini penting dalam menilai sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara optimal dan profesional.

2. Rasio Tingkat Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode (Halim, 2012). Tingkat pertumbuhan PAD berguna untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan yang bersumber dari potensi lokal secara berkelanjutan. Pertumbuhan PAD yang positif mengindikasikan adanya upaya dan strategi yang efektif dalam peningkatan penerimaan daerah.

3. Varians PAD

Varians pendapatan adalah selisih antara target yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh, varians ini dapat bersifat positif ataupun negatif. Varians positif terjadi apabila realisasi PAD melebihi target yang telah direncanakan.

Varians pendapatan dapat menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi keakuratan perencanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Evaluasi atas varians pendapatan juga dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara target dan realisasi PAD, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, maupun kendala teknis di lapangan.

Pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja pendapatan yang baik jika mereka dapat menghasilkan pendapatan lebih banyak daripada yang dianggarkan. Sebaliknya jika mereka menghasilkan pendapatan lebih sedikit daripada yang dianggarkan, maka kinerja mereka dianggap kurang baik. Menurut (Mahmudi, 2016), selisih lebih pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favorable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavorable variance*).

4. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian sumber pendanaan, dan semakin kecil ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kontribusi PAD juga menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dengan demikian, indikator ini menjadi penting dalam mengukur kapasitas fiskal daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya. Peningkatan kontribusi PAD merupakan salah satu tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman periode 2017 hingga 2023 dan menguraikan perkembangan, efektivitas, pertumbuhan, serta kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara rinci. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berbentuk angka dan diolah dengan metode statistik sederhana seperti perhitungan persentase, rasio dan tingkat pertumbuhan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berperan sebagai pihak pengelola pendapatan daerah. Subjek penelitian merupakan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pelaporan pendapatan asli daerah.

Adapun objek penelitian adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2023 yang meliputi:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data ordinal dan data rasio. Data ordinal merupakan data mentah yang berwujud nilai dalam rupiah yang ada pada laporan realisasi anggaran. Data ordinal tersebut diolah menjadi data rasio menggunakan rumus yang sudah ditentukan menjadi bentuk persentase dan akan disajikan dalam bentuk grafik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Data sekunder berfungsi untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh data primer. Sumber data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017 hingga 2023, yang diperoleh melalui laman web Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman <https://bkad.slemankab.go.id/laporan-realisisi-anggaran/>.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdapat pada laman web Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman <https://bkad.slemankab.go.id/laporan-realisisi-anggaran/>.

E. Metode Analisis

1. Analisis Efektivitas PAD

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD (Halim & Kusufi, 2012).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD\ (n)}{Anggaran\ PAD\ (n)} \times 100$$

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Keterangan:

Realisasi PAD adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber PAD dalam periode tertentu.

Anggaran PAD adalah rencana atau estimasi yang diharapkan dapat diperoleh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1. Kriteria pengukuran efektivitas

| Kemampuan Keuangan | Analisis Efektivitas (%) |
|--------------------|--------------------------|
| Sangat efektif | >100 |
| Efektif | 100 |
| Cukup efektif | 90-99 |
| Kurang efektif | 75-89 |
| Tidak efektif | <75 |

Sumber: (Mahmudi, 2016)

2. Analisis Pertumbuhan PAD

Analisis pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pada pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan mengalami pertumbuhan yang positif (membaik) atau negatif (menurun) daripada tahun sebelumnya (Hakim, 2018).

Analisis Pertumbuhan

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}(X_n) - \text{Realisasi PAD}(X_n - 1)}{\text{Realisasi PAD}(X_n - 1)} \times 100$$

Sumber: (Liantino, 2018)

Keterangan:

Realisasi PAD (X_n) adalah jumlah pendapatan asli daerah yang benar benar diterima pada suatu tahun atau tahun berjalan.

Realisasi PAD (X_{n-1}) adalah jumlah pendapatan asli daerah yang benar-benar diterima pada tahun anggaran sebelumnya.

3. Analisis Varians PAD

Analisis varians umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi perbedaan antara anggaran dan realisasi (Mahmudi, 2016). Evaluasi atas varians pendapatan juga dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi PAD, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, maupun kendala teknis di lapangan. Selisih lebih pendapatan merupakan selisih yang diharapkan dapat disebut (*favorable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavorable variance*) (Mahmudi, 2016).

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi PAD (n)} - \text{Anggaran PAD (n)}$$

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Keterangan:

Realisasi PAD adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber PAD dalam periode tertentu.

Anggaran PAD adalah rencana atau estimasi yang diharapkan dapat diperoleh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4. Analisis Kontribusi PAD

Rasio kontribusi PAD digunakan untuk mengetahui besar kecilnya peran PAD dalam struktur pendapatan daerah. Semakin besar kontribusinya, semakin mandiri daerah tersebut (Mahmudi, 2016).

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD (n)}}{\text{Total realisasi pendapatan daerah (n)}} \times 100$$

Sumber: (Mardiasmo, 2018)

Keterangan:

Realisasi PAD adalah total pendapatan asli daerah yang benar-benar diterima.

Total pendapatan daerah adalah jumlah dari semua komponen pendapatan, yaitu PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sleman

1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten atau kota yang berada di wilayah kota Yogyakarta. Sebagai bagian dari wilayah istimewa, Sleman tidak hanya memiliki sejarah panjang dari sisi kebudayaan dan pemerintahan, tetapi juga dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang dari masa ke masa.

Secara historis wilayah ini memiliki sejarah yang kuat sejak kerajaan Mataram Islam berkembang pada abad ke-16. Meskipun sistem pengelolaan keuangan daerah pada saat itu masih tradisional dan kurang canggih, keberadaan kerajaan ini menjadi awal terbentuknya sistem pemerintahan lokal yang terorganisir. Keuangan kerajaan pada masa itu berasal dari upeti, pajak hasil bumi, dan iuran masyarakat sebagai bentuk loyalitas terhadap raja. Dikemudian hari, sistem ini menjadi cikal bakal pengelolaan keuangan daerah meskipun masih tradisional.

Setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu kesultanan Yogyakarta dan kasunanan Surakarta, Sleman masuk ke dalam wilayah kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itu, Sleman menjadi bagian dari pemerintahan tradisional yang tetap ada hingga saat ini berkat keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan wilayah termasuk bagian keuangan mulai berkembang dalam struktur pemerintahan kesultanan. Beberapa wilayah diatur secara administratif oleh pejabat-pejabat lokal, yang bertanggung jawab atas pengumpulan hasil bumi, perindustrian kembali sumber daya, dan pengumpulan pajak lokal.

Pengelolaan wilayah Sleman mengalami perubahan besar selama era kolonial Belanda, dengan menciptakan wilayah *afdeling* dan *kawedanan*, yaitu wilayah dengan struktur pemerintahan sendiri, pemerintah kolonial memperkenalkan sistem administrasi modern. Sistem ini memulai

pengelolaan wilayah Sleman dengan pendekatan administratif yang lebih terorganisir. Di masa ini, pemerintah kolonial mulai menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah, meskipun pada awalnya lebih ditujukan untuk kepentingan penjajah. Saat itu, penerimaan dan pengeluaran wilayah belum bergantung pada anggaran publik seperti yang digunakan sekarang. Sebaliknya, sudah dikenalkan sistem untuk mengumpulkan pajak dan iuran masyarakat lokal secara terstruktur.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat membentuk sistem pemerintahan yang lebih formal dan mandiri di tingkat lokal. Kabupaten Sleman resmi dibentuk dan ditetapkan sebagai daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 1950, yang mengatur pembentukan kabupaten-kabupaten di wilayah DIY. Sejak saat itu, Sleman memiliki struktur pemerintahan sendiri. Setelah terbentuknya pemerintahan kabupaten, Sleman mulai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah. Awalnya, struktur APBD masih sangat sederhana dan sebagian besar dananya bersumber dari pemerintah pusat.

Perkembangan sistem keuangan daerah di kabupaten Sleman mengalami perubahan yang besar seiring diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, khususnya sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999, kemudian berubah menjadi UU No 32 tahun 2004 dan terakhir menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten Sleman diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan melalui kebijakan tersebut, termasuk dalam hal keuangan.

Dengan adanya otonomi daerah, kabupaten Sleman mulai fokus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Sejak saat itu, pemerintah kabupaten Sleman aktif mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Upaya ini bertujuan agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU)

atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan PAD juga menjadi indikator kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah kabupaten Sleman terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan melalui penerapan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai inovasi sistem penganggaran, seperti penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SKID), *e-budgeting*, dan pelaporan berbasis akrual sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pemerintah Sleman juga terus memperbaiki mekanisme perencanaan dan pengawasan anggaran melalui penguatan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD), serta koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Program-program yang didanai oleh APBD pun diarahkan untuk mendukung pembangunan lokal, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Sleman.

2. Lambang Daerah Kabupaten Sleman

Gambar 1. Lambang Daerah Kabupaten Sleman



Sumber: <https://slemankab.go.id>

Dasar lambang:

- a. Pancasila

- b. Kekayaan alam
- c. Kebudayaan

Warna pada Lambang Kabupaten Sleman:

- a. Kuning : Keluhuran.
- b. Kuning keemasan : Keemasan/Kejayaan.
- c. Merah : Keberanian.
- d. Putih : Kesucian.
- e. Biru tua : Kesetiaan.
- f. Biru muda : Cita-cita.
- g. Hijau : Kemakmuran.
- h. Hitam : Keabadian.

Lukisan lambang kabupaten Sleman memiliki makna berikut ini:

- a. Bentuk segi empat, melambangkan prasaja dan kekuatan.
- b. Bintang sudut lima dengan warna kuning emas, merupakan lambang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pancasila.
- c. Perisai bentuk segi lima, melambangkan persatuan dan kesatuan sebagai dasar untuk menyempurnakan masyarakat.
- d. Gunung Merapi, melambangkan kemegahan daerah kabupaten Sleman dan berdiri tegak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan pancasila.
- e. Candi Prambanan, melambangkan tingginya kebudayaan daerah Kabupaten Sleman yang mengandung arti gotong-royong dalam menuju kejayaan.
- f. Sinar dengan jari-jari masing-masing lima, menggambarkan kecemerlangan bagi daerah Sleman sepanjang masa.
- g. Tiga gelombang menggambarkan tiga sungai, yang melambangkan kemakmuran dalam mempertinggi pangan dan sandang di daerah kabupaten Sleman. kali Krasak, mengalir di sebelah barat laut, kali Kuning dibagian tengah dan kali Opak di sebelah timur daerah kabupaten Sleman.

- h. Lukisan batang padi dan kapas disamping, melambangkan pangan dan sandang, juga melukiskan tanggal dan tahun pindahnya pemerintah kabupaten Sleman dari ibukota darurat di Ambarukmo ke Beran. Empat buah kapas melambangkan tanggal empat, tujuh buah bulir padi melambangkan bulan tujuh atau Juli. Enam daun kapas dan empat lembar daun padi melambangkan tahun 64, dengan surya sengkolo: catur rasa trus manunggal (1964).
- i. Semua yang berbentuk dan berbilangan melambangkan Pancasila. Kata Sleman, ditulis di atas warna kuning emas, melambangkan keagungan dan keemasan bagi daerah kabupaten Sleman.

3. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Visi

“Membangun Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil Makmur, Lestasi dan Berkeadaban”

Misi

- a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui sektor pendidikan dan pelatihan.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, guna menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- c. Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- d. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui sektor pertanian, UMKM, pariwisata, serta sektor ekonomi inklusif dan kreatif.
- e. Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum demi menjamin hak-hak rakyat.
- f. Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Hasil Perhitungan dan Pembahasan

1. Data Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2017-2023

Tabel 1. Data Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2017-2023

| Keterangan | Tahun | Anggaran PAD | Realisasi PAD |
|------------|-------|--------------------|----------------------|
| t-1 | 2016 | 648.841.915.155,32 | 717.151.176.028,57 |
| t0 | 2017 | 718.151.492.310 | 825.637.751.681,82 |
| t+1 | 2018 | 821.071.767.742,63 | 894.272.962.557,85 |
| t+2 | 2019 | 903.278.920.723,56 | 972.049.575.206,45 |
| t+3 | 2020 | 676.743.940.021,93 | 788.264.742.472,73 |
| t+4 | 2021 | 770.675.023.451 | 803.679.358.719,08 |
| t+5 | 2022 | 1.031.150.840.396 | 1.061.064.803.656 |
| t+6 | 2023 | 1.088.934.414.744 | 1.130.157.860.240,59 |

Sumber: <https://bkad.slemankab.go.id>

2. Data Total Pendapatan Tahun 2017-2023

Tabel 2. Data Total Pendapatan Tahun 2017-2023

| Tahun | Anggaran Pendapatan | Realisasi Pendapatan |
|-------|----------------------|----------------------|
| 2017 | 2.547.479.046.978,03 | 2.615.515.097.398,98 |
| 2018 | 2.641.398.020.269,28 | 2.712.794.080.456,21 |
| 2019 | 2.779.380.276.199,62 | 2.840.636.285.803,45 |
| 2020 | 2.538.365.663.110,00 | 2.541.050.870.612,73 |
| 2021 | 2.697.335.484.658,00 | 2.793.328.384.634,58 |
| 2022 | 2.973.745.538.756,00 | 3.005.980.155.062,84 |
| 2023 | 3.020.272.439.303 | 3.083.612.992.324,47 |

Sumber: <https://bkad.slemankab.go.id>

3. Analisis Efektivitas PAD

$$\text{Rumus Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD (n)}}{\text{Anggaran PAD (n)}} \times 100$$

Rumus perhitungan di atas menggunakan data yang diketahui pada Tabel 1.

Maka perhitungan dilakukan seperti dibawah ini:

$$\begin{aligned} 2017 &= \frac{825.637.751.681,82}{718.151.492.310} \times 100 \\ &= 1,14967 \times 100 \\ &= 114,96 \% \end{aligned}$$

$$2018 = \frac{894.727.962.557,85}{821.071.767.742,63} \times 100$$

$$= 1,08970 \times 100$$

$$= 108,97 \%$$

Perhitungan berlanjut hingga tahun terakhir yaitu 2023 sebagai berikut:

$$2023 = \frac{1.130.157.860.240,59}{1.088.934.414.744} \times 100$$

$$= 1,03785 \times 100$$

$$= 103,78 \%$$

Sehingga hasil nilai efektivitas PAD tahun 2017 hingga tahun 2023 seperti

Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Analisis Efektivitas PAD tahun 2017-2023

| Tahun | Anggaran PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Rasio (%) | Kriteria |
|-------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|
| 2017 | 718.151.492.310 | 825.637.751.681,82 | 114,97 | Sangat Efektif |
| 2018 | 821.071.767.742,63 | 894.272.962.557,85 | 108,92 | Sangat Efektif |
| 2019 | 903.278.920.723,56 | 972.049.575.206,45 | 107,61 | Sangat Efektif |
| 2020 | 676.743.940.021,93 | 788.264.742.472,73 | 116,48 | Sangat Efektif |
| 2021 | 770.675.023.451 | 803.679.358.719,08 | 104,28 | Sangat Efektif |
| 2022 | 1.031.150.840.396 | 1.061.064.803.656 | 102,90 | Sangat Efektif |
| 2023 | 1.088.934.414.744 | 1.130.157.860.240,59 | 103,79 | Sangat Efektif |

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil dari perhitungan analisis efektivitas, akan ditampilkan dalam bentuk grafik untuk membandingkan efektivitas PAD tiap tahunnya yang dapat, dilihat pada Grafik 1 berikut.

Grafik 1. Efektivitas PAD



Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pendapatan asli daerah periode 2017 hingga 2023 menunjukkan kriteria yang kurang memuaskan, meskipun secara umum masih berada pada kategori sangat efektif dengan rasio diatas 100%. Namun, dilihat dari grafik diatas terdapat kecenderungan penurunan efektivitas dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2017, efektivitas PAD mencapai 114,97% yang menunjukkan bahwa realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta kemungkinan adanya perencanaan anggaran yang konservatif. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan efektivitas masing-masing menjadi 108,92% dan 107,61%. Penurunan ini meskipun relatif kecil, mengindikasikan bahwa target PAD mulai dinaikkan, namun realisasinya belum meningkat secara proporsional.

Rasio efektivitas paling tinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 116,48%, hal ini menandakan pemerintah kabupaten Sleman mampu melalui tantangan yang ada pada saat itu terbukti berhasil mencapai bahkan melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Meskipun pada kenyataannya anggaran tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19. Pada Perda No 5 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dilaporkan bahwa anggaran tahun 2020 terjadi penyesuaian, penyesuaian tersebut menurunkan anggaran yang awalnya sebesar Rp944.481.898.316,49 menjadi Rp676.743.940.021,93 untuk menyesuaikan kondisi ekonomi, sementara realisasi PAD masih relatif terjaga. Artinya pemerintah daerah peka terhadap tantangan yang sedang dihadapi saat itu mempengaruhi ekonomi di wilayahnya sehingga diperlukan penyesuaian tersebut.

Setelah itu, rasio efektivitas tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup tajam ke angka 104,28%. Penurunan ini disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi terhadap ekonomi lokal. Terutama terhadap sektor-sektor andalan PAD seperti pariwisata, pajak hotel, restoran, hiburan, dan

sektor perdagangan. Pemulihan ekonomi lokal belum sepenuhnya pulih, dan hal ini turut mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menaikkan kembali target PAD sebagai bentuk optimisme pemulihan ekonomi.

Efektivitas PAD kembali menurun ke angka 102,90% pada tahun 2022. Meskipun angka ini masih diatas 100%, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berjalan lambat. Anggaran PAD mungkin kembali meningkat untuk mendukung pembiayaan belanja daerah yang meningkat pasca pandemi, namun realisasinya masih belum cukup signifikan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang masih beradaptasi dengan kondisi normal yang baru.

Terakhir tahun 2023, memiliki rasio sebesar 103,79%. Pada tahun ini rasio efektivitas mulai naik dibandingkan tahun 2022 meskipun hanya sedikit, yaitu sebesar 0,89%. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi dan kapasitas fiskal pemerintah yang mulai menunjukkan hasil, meskipun belum kembali ke tingkat efektivitas seperti awal periode.

Secara keseluruhan, PAD kabupaten Sleman masih efektif berada diatas 100%, tetapi ada trend penurunan perlu mendapat perhatian. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kembali strategi mereka untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak, serta memaksimalkan potensi lokal. Selain itu, agar tidak terlalu optimis namun dapat tetap dapat dicapai, anggaran PAD harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini dan daya bayar masyarakat.

4. Analisis Pertumbuhan PAD

Analisis Pertumbuhan

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}(X_n) - \text{Realisasi PAD}(X_n - 1)}{\text{Realisasi PAD}(X_n - 1)} \times 100$$

Rumus perhitungan di atas menggunakan data yang diketahui pada Tabel 1.

Maka perhitungan dilakukan sebagai berikut:

$$2017 = \frac{825.637.751.681,82 - 717.151.176.082,57}{717.151.176.082,57} \times 100$$

$$= \frac{108.486.575.599,25}{717.151.176.082,57} \times 100$$

$$= 15,13\%$$

$$2018 = \frac{894.272.962.557,85 - 825.637.751.681,82}{825.637.751.681,82} \times 100$$

$$= \frac{68.635.210.876,03}{825.637.751.681,82} \times 100$$

$$= 8,31\%$$

Perhitungan terus berlanjut hingga tahun terakhir 2023 sebagai berikut:

$$2023 = \frac{1.130.157.860.240,59 - 1.061.064.803.565}{1.061.064.803.565} \times 100$$

$$= \frac{69.093.056.675,59}{1.061.064.803.565} \times 100$$

$$= 6,51\%$$

Sehingga hasil nilai pertumbuhan PAD tahun 2017 hingga tahun 2023 seperti Tabel 4 berikut ini:

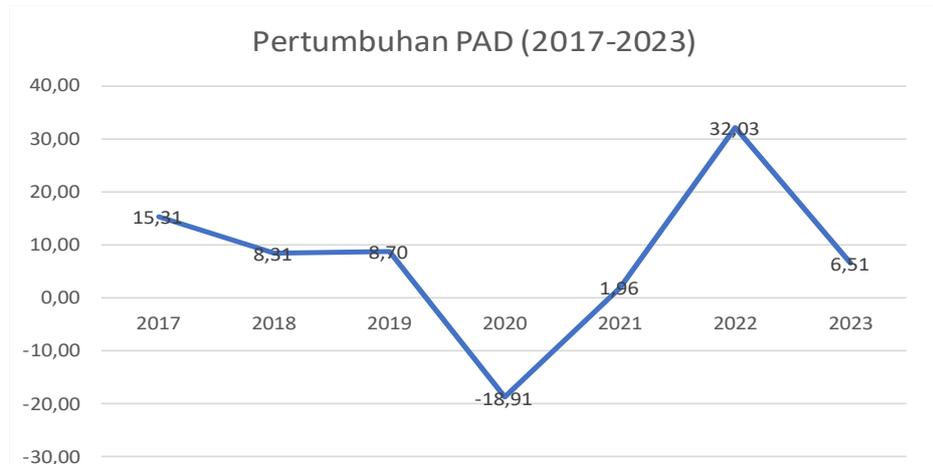
Tabel 4. Hasil Analisis Pertumbuhan PAD tahun 2017-2023

| Tahun | Realisasi PAD X _n | Realisasi PAD X _{n-1} | Rasio (%) | Kriteria |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 2017 | 825.637.751.681,82 | 717.151.176.028,57 | 15,13 | Positif |
| 2018 | 894.272.962.557,85 | 825.637.751.681,82 | 8,31 | Positif |
| 2019 | 972.049.575.206,45 | 894.272.962.557,85 | 8,70 | Positif |
| 2020 | 788.264.742.472,73 | 972.049.575.206,45 | -18,91 | Negatif |
| 2021 | 803.679.358.719,08 | 788.264.742.472,73 | 1,96 | Positif |
| 2022 | 1.061.064.803.656 | 803.679.358.719,08 | 32,03 | Positif |
| 2023 | 1.130.157.860.240,59 | 1.061.064.803.656 | 6,51 | Positif |
| | | Rata-rata | 7,67 | Positif |

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil dari perhitungan analisis pertumbuhan PAD di atas akan disajikan dalam bentuk grafik untuk melihat naik turunnya pertumbuhan PAD setiap tahun, pada Grafik 2 dibawah.

Grafik 2. Pertumbuhan PAD



Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman periode tahun 2017 hingga tahun 2023 dalam kriteria positif dengan rata-rata rasio 7,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten Sleman dalam keadaan baik pada masa periode tersebut. Grafik yang dihasilkan dari data tersebut menunjukkan kecenderungan pertumbuhan mendatar, yang berarti pertumbuhan PAD tidak menunjukkan kenaikan secara konsisten. Grafik tidak membentuk trend naik yang kuat karena fluktuasi tajam, pertumbuhan rendah, dan penurunan drastis pada beberapa tahun.

Pada tahun 2017, PAD mengalami pertumbuhan sebesar 15,31%. Pertumbuhan ini menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang cukup baik dan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor utama, seperti pajak daerah dan retribusi. Peningkatan ini juga bisa dikaitkan dengan upaya awal untuk meningkatkan pemungutan pajak dan meningkatkan pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan penerimaan PAD.

Tahun 2018 pertumbuhan PAD mengalami penurunan menjadi 8,31% meskipun masih positif. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak sebesar tahun sebelumnya. Ini dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, serta kurangnya terobosan baru dalam penggalian sumber PAD.

Tahun 2019 pertumbuhan PAD sedikit meningkat menjadi 8,70%. Kenaikan ini relatif stabil dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menjaga pertumbuhan meskipun dalam skala terbatas. Namun demikian, tidak adanya peningkatan menunjukkan bahwa sumber ekonomi PAD belum berkembang secara signifikan.

Pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya, dengan kriteria “negatif” dan memiliki rasio -18,91%. Pada tahun sebelumnya meskipun angkanya tidak terlalu tinggi namun masih dalam kriteria yang “positif”, penurunan angka ini dianggap sangatlah memprihatinkan. Pandemi Covid-19 mungkin yang menyebabkan penurunan drastis ini, yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi yang drastis pula. Karena mobilitas masyarakat pada saat itu dibatasi. Pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan penurunan daya beli, serta berhentinya sebagian sektor pariwisata dan jasa menyebabkan penurunan tajam pada sumber-sumber PAD, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi pasar. Secara nasional PAD daerah mengalami tekanan besar selama pandemi karena penurunan aktivitas ekonomi (Kurniati, 2021). Penurunan ini mencerminkan kerentanan struktur PAD Sleman terhadap gangguan ekonomi makro.

Berikutnya tahun 2021, sudah mulai terlihat ada pergerakan ekonomi. Pada tahun ini rasio pertumbuhan mulai naik ke kriteria positif dengan angka 1,96%. Meskipun hanya sedikit, namun hal ini sudah sangat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka minus. Hal ini mungkin disebabkan belum pulihnya seluruh sektor ekonomi, serta adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan pelaku usaha pasca pandemi. Sesuai dengan pandangan (Sutrisno, 2021), bahwa pemulihan ekonomi daerah memerlukan waktu adaptasi terhadap kebiasaan baru dan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya adalah tahun 2022 yang dimana pada tahun ini adalah kebalikan dari tahun 2020. Pada tahun ini pertumbuhan pendapatan asli daerah melambung tinggi mencapai kriteria positif dan memiliki angka rasio

32,03%. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan sebageian besar sektor ekonomi yang sangat baik setelah melalui tantangan eksternal yang sangat sulit pada waktu itu, terutama sektor pariwisata dan perdagangan.

Terakhir tahun 2023, pertumbuhan PAD kembali melambat menjadi 6,51%. Penurunan ini bisa dapat dianggap sebagai kembali ke tingkat normal setelah lonjakan tinggi tahun sebelumnya. Meski demikian, angka ini menunjukkan bahwa upaya baru diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan PAD, terutama mengingat struktur ekonomi yang terus berubah dan keterbatasan fiskal di daerah.

5. Analisis Varians PAD

Varians Pendapatan = Realisasi PAD (n) – Anggaran PAD (n)

Rumus perhitungan diatas menggunakan data yang diketahui pada Tabel 1.

Maka dilakukan perhitungan seperti berikut ini:

$$\begin{aligned} 2017 &= 825.637.751.681,82 - 718.151.492.310 \\ &= 107.486.259.371,82 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2018 &= 894.272.962.557,85 - 821.071.767.742,63 \\ &= 73.201.194.815,22 \end{aligned}$$

Perhitungan berlanjut hingga tahun terakhir yaitu tahun 2023.

$$\begin{aligned} 2023 &= 1.130.157.860.240,59 - 1.088.934.414.744 \\ &= 41.223.445.496,59 \end{aligned}$$

Setelah itu perhitungan ditampilkan dalam bentuk tabel, dapat dilihat didalam Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis Varians PAD tahun 2017-2023

| Tahun | Realisasi PAD | Anggaran PAD | Varians PAD | Keterangan |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2017 | 825.637.751.681,82 | 718.151.492.310 | 107.486.259.371,82 | Favorable |
| 2018 | 894.272.962.557,85 | 821.071.767.742,63 | 73.201.194.815,22 | Favorable |
| 2019 | 972.049.575.206,45 | 903.278.920.723,56 | 68.770.654.482,89 | Favorable |
| 2020 | 788.264.742.472,73 | 676.743.940.021,93 | 111.520.802.450,80 | Favorable |
| 2021 | 803.679.358.719,08 | 740.675.023.451 | 63.004.335.268,08 | Favorable |
| 2022 | 1.061.064.803.656 | 1.031.150.840.396 | 29.913.963.260,00 | Favorable |
| 2023 | 1.130.157.860.240,59 | 1.088.934.414.744 | 41.223.445.496,59 | Favorable |
| | | Rata-rata | 70.731.522.163,63 | Favorable |

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, dapat dilihat bahwa capaian varians pendapatan asli daerah kabupaten Sleman periode tahun 2017 hingga tahun 2023 menunjukkan selisih yang cukup besar terhadap target atau anggaran, memiliki rata-rata sebesar Rp70.731.552.163,63. Angka ini menunjukkan secara keseluruhan pada periode yang bersangkutan realisasi PAD selalu melebihi anggaran PAD yang sudah ditentukan.

Pada tahun 2017, varians PAD tercatat sebesar Rp107.486.259.371,82. Realisasi PAD yang jauh melampaui anggaran mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan lebih dari yang dianggarkan. Pada tahun ini wajib pajak yang dianggarkan Rp449,6 miliar dapat tercapai sebesar Rp528,4 miliar, lain-lain PAD yang sah dianggarkan Rp189,5 miliar tercapai Rp211,8 miliar (Nugroho, 2018).

Tahun 2018 menunjukkan penurunan nilai varians PAD dibandingkan tahun 2017 menjadi Rp73.201.194.815,22. Ini dikarenakan pada tahun ini beberapa sektor pajak belum optimal. Sektor pajak yang belum sesuai dengan target adalah pajak restoran, reklame dan penerangan jalan. Pemerintah daerah mengusahakan untuk mengoptimalkan *income* dari sektor pariwisata dengan mengadakan *event* untuk menarik wisatawan. Beberapa *event* diantaranya mendapat apresiasi besar dari publik seperti Festival Merapi (22-23 Desember 2018), Festival of Light (15 Desember 2018 – 20 Januari 2019), dan Festival Lampion Penjor (20 Desember 2018 – 7 Januari 2019) (Sobari, 2019).

Varians pendapatan daerah kembali menurun dengan angka Rp68.770.654.482,89 pada tahun 2019. Ketua Komisi B DPRD Sleman mengatakan hingga saat ini Sleman belum memiliki kajian potensi PAD, sehingga belum bisa menyerap PAD secara maksimal. Sektor pendapatan yang belum optimal adalah sektor pajak dan retribusi tempat-tempat hiburan dan pariwisata (Anugrah, 2019). Pemerintah kabupaten Sleman menargetkan kunjungan wisatawan manca negara maupun wisatawan dalam negeri dapat menembus angka 10 juta pengunjung, untuk dapat

merealisasikan target tersebut, Dinas Pariwisata makin giat untuk mengembangkan desa wisata (Rahmayanti, 2019).

Tahun 2020 merupakan selisih tertinggi dengan nilai sebesar Rp111.520.802.450,80. Menunjukkan realisasi PAD telah melebihi anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hal ini kemungkinan terjadi karena, tahun 2020 adalah puncak terjadinya pandemi, sehingga dilakukan penyesuaian anggaran dengan lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang berdampak pada hasil varians menjadi lebih tinggi. Pada Perda Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dilaporkan bahwa anggaran tahun 2020 terjadi penyesuaian, yang awalnya Rp944.481.898.316,49 menjadi Rp676.743.940.021,93. Sehingga hasil realisasi PAD dapat melebihi anggaran yang ditentukan meskipun tidak sebanyak tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, nilai varians turun kembali dengan angka Rp63.004.335.268,08. Meskipun pada kenyataannya realisasi PAD tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2020. Hal ini dikarenakan besaran nilai nominal retribusi tahun ini lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020, akibat diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan PPKM level. Dinas Pariwisata juga berharap pandemi mulai melandai sehingga DisPar dan pelaku wisata dapat menyelenggarakan event yang tertunda untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata (Umaiyah, 2021).

Berikutnya adalah tahun 2022 dimana tahun ini memiliki nilai selisih terendah yaitu sebesar Rp29.913.963.260. Meskipun memiliki nilai terendah namun realisasinya berhasil melebihi anggaran yang ditentukan, dan penerimaan PAD lebih banyak daripada tahun sebelumnya. DPRD kabupaten Sleman menyarankan untuk sosialisasi kepada wajib pajak lebih digencarkan lagi, petugas pemungut pajak harus sering menyambangi wajib pajak, jika perlu dilakukan jemput bola supaya capaian pendapatan maksimal (DPRD Kab.Sleman, 2022).

Terakhir tahun 2023, memiliki nilai varians PAD sebesar Rp41.223.445.496,59. Nilai varians tahun ini lebih besar daripada tahun

2022, dikarenakan pemerintah kabupaten Sleman mulai menerapkan pembayaran PBB-P2 menggunakan QRIS BPD DIY. Inovasi ini diterapkan untuk memudahkan masyarakat melakukan proses transaksi, selain itu juga cepat, dan terjaga keamanannya. Mengingat masyarakat yang saat ini lebih sering menggunakan QRIS karena lebih praktis (Nurwanto, 2024).

6. Analisis Kontribusi PAD

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD (n)}}{\text{Total realisasi pendapatan daerah (n)}} \times 100$$

Rumus perhitungan diatas menggunakan data realisasi pada Tabel 1 dan Tabel 2. Maka perhitungan dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 2017 &= \frac{825.637.751.681,82}{2.615.515.097.398,98} \times 100 \\ &= 0,315669 \times 100 \\ &= 31,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{894.272.962.557,85}{2.712.794.080.456,21} \times 100 \\ &= 0,329650 \times 100 \\ &= 32,96\% \end{aligned}$$

Perhitungan berlanjut hingga tahun terakhir yaitu 2023.

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{1.130.157.860.240,59}{3.083.612.992324,47} \times 100 \\ &= 0,366504 \times 100 \\ &= 36,65\% \end{aligned}$$

Sehingga hasil nilai kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

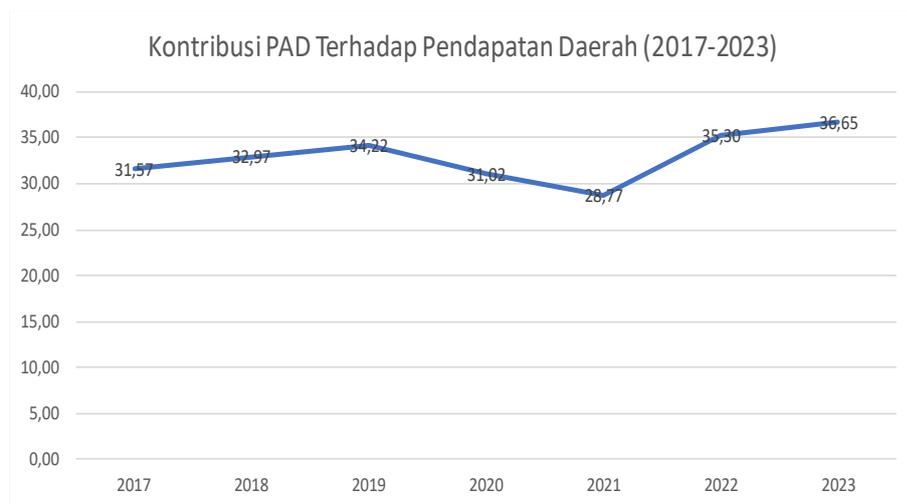
Tabel 6 . Hasil Perhitungan Analisis Kontribusi PAD tahun 2017-2023

| Tahun | Realisasi PAD | Total Realisasi Pendapatan Daerah | Kontribusi (%) |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2017 | 825.637.751.681,82 | 2.615.515.097.398,98 | 31,57 |
| 2018 | 894.272.962.557,85 | 2.712.794.080.456,21 | 32,97 |
| 2019 | 972.049.575.206,45 | 2.840.636.285.803,45 | 34,22 |
| 2020 | 788.264.742.472,73 | 2.541.050.870.612,73 | 31,02 |
| 2021 | 803.679.358.719,08 | 2.793.328.384.634,58 | 28,77 |
| 2022 | 1.061.064.803.656 | 3.005.980.155.062,84 | 35,30 |
| 2023 | 1.130.157.860.240,59 | 3.083.612.992.324,47 | 36,65 |
| Rata-rata | | | 32,93 |

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil nilai dari perhitungan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diatas, akan disajikan dalam bentuk grafik untuk mengetahui tingkat kontribusi setiap tahunnya, dapat dilihat dalam Grafik 3 dibawah ini.

Grafik 3. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah



Berdasarkan hasil analisis data di atas, yang mengukur tingkat kontribusi PAD, dapat diketahui bahwa peranan PAD terhadap total pendapatan daerah periode tahun 2017 hingga tahun 2023 memiliki kecenderungan bergerak mendatar, memiliki rata-rata rasio kontribusi 32,93%. Tahun 2017 hingga tahun 2019 meningkat namun turun pada tahun 2020 hingga tahun 2021, dan mulai meningkat kembali pada tahun 2022. Menurut (Marhamah & Harsono, 2025) jika rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai lebih dari 25% tergolong sangat baik.

Pada tahun 2017, kontribusi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah berada pada angka 31,57%, menunjukkan bahwa lebih dari pertiga pendapatan daerah berasal dari sumber PAD. Nilai ini mencerminkan kondisi keuangan daerah cukup baik dan menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri.

Tahun 2018 terjadi peningkatan kontribusi PAD sebesar 1,40% dibandingkan tahun 2017, memiliki angka sebesar 32,97%. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai hasil dari penguatan kapasitas pemungutan pajak daerah dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai melakukan perbaikan pengelolaan sumber pendapatan lokal.

Selanjutnya tahun 2019, di mana kontribusi PAD naik menjadi 34,22%, atau meningkat 1,25% dari tahun 2018. Tahun ini merupakan salah satu tahun terbaik dalam kontribusi PAD sebelum pandemi datang. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor penyumbang PAD seperti pariwisata, hotel, restoran dan jasa lainnya berjalan dengan baik dan optimal.

Tahun 2020 merupakan awal penurunan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 3,2% dengan rasio sebesar 31,02%. Tahun ini memang terjadi penurunan realisasi PAD dan total pendapatan daerah. Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp972.049575.206,45 turun menjadi Rp788.264.742.427,73 pada tahun 2020, dan total pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2.840.636.285.803,45 turun menjadi Rp2.541.050870.612,73 pada tahun 2020. Pada tahun ini merupakan puncak terjadinya pandemi Covid-19, dimana semua aktivitas masyarakat dibatasi yang menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, sehingga mempengaruhi terjadinya penurunan PAD pada Kabupaten Sleman.

Selanjutnya tahun 2021, tahun ini mengalami penurunan kembali sebesar 2,25% dengan rasio 28,77%. Meskipun rasionya mengalami penurunan, sebenarnya realisasi PAD dan total pendapatan daerah pada tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2020. Realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp803.679.358.729,08 dan pendapatan daerah sebesar Rp2.793.328.384.634,68. Tahun ini merupakan tahun terendah selama

periode 2017 hingga 2023. Ketidakstabilan ekonomi dan pembatasan sosial masih berlangsung diberbagai daerah, yang membuat PAD belum pulih secara maksimal.

Berikutnya tahun 2022 realisasi PAD meningkat sejalan dengan total pendapatan daerah yang meningkat pula, dengan rasio sebesar 35,30%. Memiliki Realisasi PAD sebesar Rp1.061.064.803.656 dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3.005.980.155.062,84. Tahun ini adalah awal mula mulai meningkatnya kembali kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Ini menandakan pemulihan ekonomi lokal mulai terjadi, seiring dengan pelanggaran kebijakan PPKM, sehingga aktivitas pariwisata dan sektor jasa kembali meningkat. Pemulihan ini sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan *rebound* ekonomi pasca pandemi (BAPPENAS, 2022).

Terakhir adalah tahun 2023, kontribusi PAD meningkat menjadi 36,65%, nilai ini merupakan nilai tertinggi dalam periode 2017 hingga 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian fiskal serta keberlanjutan pemulihan ekonomi lokal. Berdasarkan Permendagri No 77 tahun 2020, kenaikan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat mulai berkurang.

Rangkuman:

| No | Rasio | Rangkuman |
|----|-----------------|---|
| 1 | Efektifitas PAD | Kriteria sangat efektif, dengan kecenderungan menurun. |
| 2 | Pertumbuhan PAD | Kriteria positif, dengan kecenderungan pertumbuhan mendatar. |
| 3 | Varians PAD | Setiap tahunnya dapat melebihi anggaran yang ditentukan dengan rata-rata Rp70.731.522.163,63. |
| 4 | Kontribusi PAD | Rata-rata kontribusi 32,93%, dengan kecenderungan bergerak mendatar. |

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini secara sistematis menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengukur kinerja keuangan Kabupaten Sleman periode 2017 hingga 2023 melalui pendekatan rasio keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis efektivitas, pertumbuhan, varians, dan kontribusi PAD, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas PAD

Efektivitas PAD Kabupaten Sleman selama periode tahun 2017 hingga tahun 2023 tergolong sangat efektif, karena realisasi PAD selalu melebihi 100%. Namun, PAD mulai menurun dari tahun ke tahun, yang menunjukkan strategi pengelolaan dan perencanaan PAD harus diperbaiki agar tetap optimal dalam jangka panjang.

2. Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD pada menunjukkan kecenderungan bergerak mendatar. Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD masih dianggap positif meskipun belum stabil secara konsisten. Tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif akibat pandemi Covid-19, sedangkan tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 32,03%.

3. Varians PAD

Selama periode penelitian, PAD selalu melebihi anggaran dengan perbedaan positif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang cenderung konservatif, meskipun tantangan seperti pandemi tetap memberikan dampak terhadap selisih anggaran.

4. Kontribusi PAD

Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 32,93%, yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang baik. Tetapi grafik kontribusi menunjukkan tren bergerak mendatar, dengan penurunan saat pandemi dan peningkatan kembali setelah pemulihan ekonomi tahun 2022 dan 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Y. (2019). *Komisi DPRD Tekankan Kajian Potensi PAD*. Harian Jogja.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/05/25/512/1214837/komisi-b-dprd-sleman-dorong-pemkab-genjot-pad-di-berbagai-sektor>
- BAPPENAS. (2022). *Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia Triwulan III Tahun 2022*. Perpustakaan Bappenas, 6(3).
https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dit%20PMAS/Laporan%20Perkembangan%200Ekonomi%20Indonesia%20dan%20Dunia%20Triwulan%20III%20Tahun%202022.pdf
- DPRD Kab.Sleman. (2022, September 30). *Optimistis PAD Sleman Tahun 2022 Tembus Rp1 Triliun*. DPRD Kab.Sleman.
<https://dprd.slemankab.go.id/2022/09/30/optimistis-pad-sleman-2022-tembus-rp-1-triliun/#:~:text=Komisi%20B%20DPRD%20Kabupaten%20Sleman%20Optimis%20realisasi%20PAD,630%20milliar%20dari%20yang%20diharapkan%20tembus%20900%20miliar.>
- Hakim, M. F. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia, 24.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6400>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 1). Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jimung, M. (2005). *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*. Penerbit Pustaka Nusatama, Yogyakarta.

- Kurniati, D. (2021, October 16). *Tren Covid Turun, Kinerja PAD Bakal Membaik Hingga Akhir Tahun*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/33682/tren-covid-turun-kinerja-pad-bakal-membaik-hingga-akhir-tahun>
- Liantino, W. (2018). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta. *Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 6. <https://eprints.ums.ac.id/64356/14/NAS PUB.pdf>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ketiga, Vol. 2016). Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Marhamah, & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. *Jurnal Syntax Imperatif*, 6(3), 359. <https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/699>
- Nugroho, A. (2018, January 18). *Realisasi PAD Tahun 2017 di Kabupaten Sleman Lampau Target*. Tribun Jogja. <https://jogja.tribunnews.com/2018/01/08/realisasi-pad-tahun-2017-di-kabupaten-sleman-lampau-target>
- Nurwanto, I. (2024, January 2). *PAD Sleman Berhasil Lampau Target Hingga Rp1,120 Triliun*. Radar Jogja. <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/653689487/pad-sleman-berhasil-lampau-target-hingga-rp-1120-triliun>

- Purwanti, N. D., & Dewi, R. M. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013. *Journal Pendidikan ekonomi*, 2(3), 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v2n3.p%25p>
- Rahmayanti, H. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Sleman. *Naskah Publikasi. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30744/12.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Universitas Gunadarma*, 1. https://www.academia.edu/3102063/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah_Dalam_Rangka_Meningkatkan_Kemampuan_Keuangan_Daerah
- Sobari, C. F. (2019). *Sleman Dulang Rp205,6 Miliar Dari Sektor Pariwisata*. Genpi.Co. <https://www.genpi.co/berita/4733/sleman-dulang-rp2056-miliar-dari-pariwisata>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata. *Journal Lemhannas RI*, 9(1). <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/385>
- Umaiyah, S. (2021). *Saat Pandemi Pendapatan Sektor Pariwisata Sleman Melampaui Target*. IDN Times. <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/saat-pandemik-pad-dinas-pariwisata-sleman-lampau-target-00-jq5qx-75f3pb>

_____. (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*.

_____. (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

| NO URUT | URAIAN | Reff | Anggaran 2016 | Realisasi 2016 | % | Realisasi 2015 |
|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.a | 383.400.000.000,00 | 407.675.230.792,56 | 106,33 | 373.137.768.070,80 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.b | 42.347.049.940,00 | 43.217.124.390,15 | 102,05 | 45.052.207.026,81 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.1.1.1.c | 41.793.366.161,55 | 42.031.674.753,95 | 100,57 | 34.330.598.540,50 |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.d | 181.301.499.053,77 | 224.227.146.091,91 | 123,68 | 190.609.506.189,92 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 648.841.915.155,32 | 717.151.176.028,57 | 110,53 | 643.130.079.828,03 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | 5.1.1.2.a | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.a.1 | 69.115.267.000,00 | 61.965.668.112,00 | 95,71 | 32.797.759.450,00 |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.a.2 | 1.090.812.000,00 | 455.626.108,00 | 41,77 | 707.111.481,00 |
| 13 | Dana Bagi Hasil Cukai | 5.1.1.2.a.3 | 0,00 | 4.183.009.396,00 | 0,00 | 4.777.066.000,00 |
| 14 | Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.a.4 | 940.848.479.672,00 | 1.014.310.630.000,00 | 107,81 | 984.410.612.000,00 |
| 15 | Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.a.5 | 247.863.502.250,00 | 240.745.571.146,00 | 97,13 | 29.421.080.000,00 |
| 16 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 1.258.918.060.922,00 | 1.321.660.504.762,00 | 104,98 | 1.052.113.628.931,00 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 5.1.1.2.b | | | | |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dana Keistimewaan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dana Penyesuaian | | 68.015.331.701,00 | 68.014.717.000,00 | 100,00 | 368.915.615.000,00 |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya | | 68.015.331.701,00 | 68.014.717.000,00 | 100,00 | 368.915.615.000,00 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 5.1.1.2.c | | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 190.069.814.155,04 | 205.041.339.466,23 | 107,88 | 198.089.393.601,09 |
| 26 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Pendapatan Dana Otonomi Khusus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | | 190.069.814.155,04 | 205.041.339.466,23 | 107,88 | 198.089.393.601,09 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | BANTUAN KEUANGAN | 5.1.1.2.d | | | | |
| 31 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi | | 11.248.600.000,00 | 8.282.200.000,00 | 73,63 | 27.241.950.000,00 |
| 33 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Jumlah Bantuan Keuangan | | 11.248.600.000,00 | 8.282.200.000,00 | 73,63 | 27.241.950.000,00 |
| 36 | Total Pendapatan Transfer | | 1.528.251.806.778,04 | 1.602.998.761.228,23 | 104,89 | 1.646.360.587.532,09 |
| 37 | | | | | | |
| 38 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 5.1.1.3 | | | | |
| 39 | Pendapatan Hibah | | 6.654.102.299,00 | 8.947.518.750,00 | 134,47 | 5.132.097.396,00 |
| 40 | Pendapatan Dana Darurat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah | | 6.654.102.299,00 | 8.947.518.750,00 | 134,47 | 5.132.097.396,00 |
| 43 | JUMLAH PENDAPATAN | | 2.183.747.824.232,36 | 2.329.097.456.006,80 | 106,66 | 2.294.622.764.756,12 |
| 44 | | | | | | |
| 45 | BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| 46 | BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | | | | |
| 47 | Belanja Pegawai | 5.1.2.1.a | 1.342.240.918.708,67 | 1.263.367.532.091,23 | 94,12 | 1.197.522.434.558,07 |
| 48 | Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.b | 610.114.144.600,00 | 543.498.494.698,44 | 89,08 | 421.722.203.992,57 |
| 49 | Bunga | 5.1.2.1.c | 3.980.000.000,00 | 3.021.102.416,00 | 75,91 | 258.765.334,00 |
| 50 | Subsidi | 5.1.2.1.d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Hibah | 5.1.2.1.e | 66.901.366.850,00 | 61.314.688.740,00 | 91,65 | 68.645.423.584,00 |
| 52 | Bantuan Sosial | 5.1.2.1.f | 32.879.939.508,00 | 29.383.789.000,00 | 89,37 | 38.703.752.000,00 |
| 53 | Jumlah Belanja Operasi | | 2.056.116.369.666,67 | 1.900.585.606.945,67 | 92,44 | 1.726.852.579.468,64 |
| 54 | | | | | | |
| 55 | BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | | | | |
| 56 | Belanja Tanah | 5.1.2.2.a | 26.021.585.677,00 | 17.784.344.140,00 | 68,34 | 86.400.618.996,00 |
| 57 | Belanja Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.b | 88.424.785.780,00 | 82.471.195.779,33 | 93,27 | 84.607.985.500,85 |
| 58 | Belanja Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.c | 124.404.960.116,00 | 116.510.914.281,00 | 93,65 | 129.575.224.082,00 |
| 59 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.d | 119.107.759.000,40 | 113.158.218.796,00 | 95,00 | 111.967.960.921,00 |
| 60 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.e | 16.991.252.170,00 | 14.077.653.235,00 | 82,85 | 14.231.037.909,00 |
| 61 | Belanja Aset Lainnya | 5.1.2.2.f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Jumlah Belanja Modal | | 374.950.342.743,40 | 344.002.326.231,33 | 91,75 | 426.782.827.408,85 |
| 63 | | | | | | |
| 64 | BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | | | | |
| 65 | Belanja Tak Terduga | | 3.659.968.596,35 | 488.737.272,00 | 13,35 | 289.688.693,84 |
| 66 | Jumlah Belanja Tak Terduga | | 3.659.968.596,35 | 488.737.272,00 | 13,35 | 289.688.693,84 |
| 67 | Jumlah Belanja | | 2.434.726.681.006,42 | 2.245.076.670.449,00 | 92,21 | 2.153.925.095.571,33 |

| NO. URUT | URAIAN | Reff | Anggaran 2016 | Realisasi 2016 | % | Realisasi 2015 |
|----------|--|-----------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | TRANSFER | 5.1.2.4 | | | | |
| 69 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | 5.1.2.4.a | | | | |
| 71 | Bagi Hasil Pajak | | 45.669.174.497,76 | 43.485.614.551,00 | 95,22 | 41.101.803.027,00 |
| 72 | Bagi Hasil Retribusi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa | | 45.669.174.497,76 | 43.485.614.551,00 | 95,22 | 41.101.803.027,00 |
| 75 | | | | | | |
| 76 | TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN | 5.1.2.4.b | | | | |
| 77 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | | 1.615.000.000,00 | 1.203.120.740,00 | 74,50 | 1.137.657.000,00 |
| 78 | Bantuan Keuangan ke Desa | | 164.627.737.568,20 | 164.627.122.867,24 | 100,00 | 131.607.187.900,00 |
| 79 | Bantuan Keuangan Lainnya | | 1.227.219.301,00 | 1.054.420.267,00 | 85,92 | 980.176.427,00 |
| 80 | Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan | | 167.469.956.869,20 | 166.884.663.874,24 | 99,65 | 133.725.021.327,00 |
| 81 | Jumlah Transfer | | 213.139.131.366,96 | 210.370.278.425,24 | 98,70 | 174.826.824.354,00 |
| 82 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | | 2.647.865.812.373,38 | 2.455.446.948.874,24 | 92,73 | 2.328.751.919.925,33 |
| 83 | | | | | | |
| 84 | SURPLUS/DEFISIT | 5.1.2.5 | (464.117.988.141,02) | (126.349.492.867,44) | 27,22 | (34.129.155.169,21) |
| 85 | | | | | | |
| 86 | PEMBIAYAAN | 5.1.3 | | | | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.1 | | | | |
| 89 | Penggunaan SILPA | | 478.521.631.855,02 | 478.521.631.855,02 | 100,00 | 499.724.664.810,23 |
| 90 | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 1.195.256.286,00 | 1.195.256.286,00 | 100,00 | 30.761.374.714,00 |
| 95 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Jumlah Penerimaan | | 479.716.888.141,02 | 479.716.888.141,02 | 100,00 | 530.486.039.524,23 |
| 102 | | | | | | |
| 103 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.2 | | | | |
| 104 | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 8.578.900.000,00 | 8.578.900.000,00 | 100,00 | 17.835.252.500,00 |
| 106 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 7.020.000.000,00 | 7.020.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 109 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Jumlah Pengeluaran | | 15.598.900.000,00 | 15.598.900.000,00 | 100,00 | 17.835.252.500,00 |
| 117 | PEMBIAYAAN NETTO | | 464.117.988.141,02 | 464.117.988.141,02 | 100,00 | 512.650.787.024,23 |
| 118 | | | | | | |
| 119 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 5.1.3.3 | 0,00 | 337.768.495.273,58 | 100,00 | 478.521.631.855,02 |

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 22 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| NO URUT | URAIAN | Reff | Anggaran 2017 (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) | % | Realisasi 2016 (Rp) |
|---------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.a | 449.600.000.000,00 | 528.453.215.727,18 | 117,54 | 407.675.230.792,56 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.b | 42.662.283.050,00 | 48.706.088.818,85 | 114,17 | 43.217.124.390,15 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.1.1.1.c | 36.292.786.406,00 | 36.292.784.407,97 | 100,00 | 42.031.674.753,95 |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.d | 189.596.422.854,00 | 212.185.662.727,82 | 111,91 | 224.227.146.091,91 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 718.151.492.310,00 | 825.637.751.681,82 | 114,97 | 717.151.176.028,57 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN | 5.1.1.2.a | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.a.1 | 64.380.478.000,00 | 55.844.322.068,00 | 86,74 | 61.965.668.112,00 |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.a.2 | 1.495.731.000,00 | 535.253.390,00 | 35,79 | 455.626.108,00 |
| 13 | Dana Bagi Hasil Cukai | 5.1.1.2.a.3 | 4.087.356.000,00 | 4.120.145.614,00 | 100,80 | 4.183.009.396,00 |
| 14 | Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.a.4 | 996.492.454.000,00 | 996.492.454.000,00 | 100,00 | 1.014.310.630.000,00 |
| 15 | Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.a.5 | 321.539.572.000,00 | 278.580.346.224,00 | 86,64 | 240.745.571.146,00 |
| 16 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 1.387.995.591.000,00 | 1.335.572.521.296,00 | 96,22 | 1.321.660.504.782,00 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA | 5.1.1.2.b | | | | |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dana Keistimewaan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dana Penyesuaian | | 133.444.737.000,00 | 133.444.737.000,00 | 100,00 | 68.014.717.000,00 |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | 133.444.737.000,00 | 133.444.737.000,00 | 100,00 | 68.014.717.000,00 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 5.1.1.2.c | | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 201.433.478.287,03 | 214.366.369.383,86 | 106,42 | 205.041.339.466,23 |
| 26 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | | |
| 27 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Pendapatan Dana Otonomi Khusus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi | | 201.433.478.287,03 | 214.366.369.383,86 | 106,42 | 205.041.339.466,23 |
| 30 | | | | | | |
| 31 | BANTUAN KEUANGAN | 5.1.1.2.d | | | | |
| 32 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi | | 17.655.805.907,00 | 17.655.805.907,00 | 100,00 | 8.282.200.000,00 |
| 34 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Jumlah Bantuan Keuangan | | 17.655.805.907,00 | 17.655.805.907,00 | 100,00 | 8.282.200.000,00 |
| 37 | Total Pendapatan Transfer | | 1.740.529.612.194,03 | 1.701.039.433.586,86 | 97,73 | 1.602.998.761.228,23 |
| 38 | | | | | | |
| 39 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 5.1.1.3 | | | | |
| 40 | Pendapatan Hibah | | 7.500.000.000,00 | 8.712.131.733,00 | 116,16 | 8.947.518.750,00 |
| 41 | Pendapatan Dana Darurat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Pendapatan Lainnya | | 81.297.942.474,00 | 80.125.780.397,30 | 98,56 | 0,00 |
| 43 | Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah | | 88.797.942.474,00 | 88.837.912.130,30 | 100,05 | 8.947.518.750,00 |
| 44 | JUMLAH PENDAPATAN | | 2.547.479.046.978,03 | 2.615.515.097.398,98 | 102,67 | 2.329.097.456.008,80 |

| NO URUT | URAIAN | Reff | Anggaran 2017 (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) | % | Realisasi 2016 (Rp) |
|---------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 45 | | | | | | |
| 46 | BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| 47 | BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | | | | |
| 48 | Belanja Pegawai | 5.1.2.1.a | 1.303.489.836.367,62 | 1.128.501.908.291,18 | 86,58 | 1.263.367.532.091,23 |
| 49 | Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.b | 663.500.298.219,86 | 590.694.164.959,82 | 89,03 | 543.498.494.698,44 |
| 50 | Bunga | 5.1.2.1.c | 2.678.741.220,00 | 2.358.580.867,00 | 88,05 | 3.021.102.416,00 |
| 51 | Subsidi | 5.1.2.1.d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Hibah | 5.1.2.1.e | 92.493.416.920,00 | 88.235.807.916,00 | 95,40 | 61.314.688.740,00 |
| 53 | Bantuan Sosial | 5.1.2.1.f | 44.730.823.005,80 | 34.694.686.100,00 | 77,56 | 29.383.789.000,00 |
| 54 | Jumlah Belanja Operasi | | 2.106.893.115.733,28 | 1.844.485.148.134,00 | 87,55 | 1.900.585.606.945,67 |
| 55 | | | | | | |
| 56 | BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | | | | |
| 57 | Belanja Tanah | 5.1.2.2.a | 70.497.422.713,00 | 24.499.277.856,00 | 34,75 | 17.784.344.140,00 |
| 58 | Belanja Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.b | 85.288.678.848,46 | 78.491.177.590,53 | 92,03 | 82471195779 |
| 59 | Belanja Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.c | 129.942.887.060,00 | 121.377.512.878,19 | 93,41 | 116.510.914.281,00 |
| 60 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.d | 129.983.390.320,00 | 119.460.878.630,00 | 91,90 | 113.158.218.796,00 |
| 61 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.e | 43.951.965.935,00 | 36.798.207.941,00 | 83,72 | 14.077.653.235,00 |
| 62 | Belanja Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Jumlah Belanja Modal | | 459.664.344.876,46 | 380.627.054.895,72 | 82,81 | 344.002.326.231,33 |
| 64 | | | | | | |
| 65 | BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | | | | |
| 66 | Belanja Tak Terduga | | 5.765.223.445,03 | 1.170.918.933,00 | 20,31 | 488.737.272,00 |
| 67 | Jumlah Belanja Tak Terduga | | 5.765.223.445,03 | 1.170.918.933,00 | 20,31 | 488.737.272,00 |
| 68 | Jumlah Belanja | | 2.572.322.684.054,77 | 2.226.283.121.962,72 | 86,55 | 2.245.076.670.449,00 |
| 69 | | | | | | |
| 70 | TRANSFER | 5.1.2.4 | | | | |
| 71 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | 5.1.2.4.a | | | | |
| 72 | Bagi Hasil Pajak | | 44.960.000.000,00 | 43.997.761.978,00 | 97,86 | 43.485.614.551,00 |
| 73 | Bagi Hasil Retribusi | | 5.476.628.305,00 | 4.750.135.664,00 | 86,73 | 0,00 |
| 74 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa | | 50.436.628.305,00 | 48.747.897.642,00 | 96,65 | 43.485.614.551,00 |
| 76 | | | | | | |
| 77 | TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN | 5.1.2.4.b | | | | |
| 78 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 100,00 | 1.203.120.740,00 |
| 79 | Bantuan Keuangan ke Desa | | 215.229.267.932,80 | 213.420.708.932,80 | 99,16 | 164.627.122.867,24 |
| 80 | Bantuan Keuangan Lainnya | | 1.150.961.980,00 | 1.064.902.790,00 | 92,52 | 1.054.420.267,00 |
| 81 | Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan | | 216.460.229.892,80 | 214.565.611.722,80 | 99,12 | 166.884.663.874,24 |
| 82 | Jumlah Transfer | | 266.896.858.197,80 | 263.313.509.364,80 | 98,66 | 210.370.278.425,24 |
| 83 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | | 2.839.219.542.252,57 | 2.489.596.631.327,52 | 87,69 | 2.455.446.948.874,24 |
| 84 | | | | | | |
| 85 | SURPLUS / (DEFISIT) | 5.1.2.5 | -291.740.495.274,54 | 125.918.466.071,46 | (43,16) | -126.349.492.867,44 |
| 86 | | | | | | |
| 87 | PEMBIAYAAN | 5.1.3 | | | | |
| 88 | | | | | | |
| 89 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.1 | | | | |
| 90 | Penggunaan SiLPA | | 337.768.495.273,58 | 337.768.495.273,58 | 100,00 | 478.521.631.855,02 |
| 91 | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.256.286,00 |
| 96 | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Jumlah Penerimaan | | 337.768.495.273,58 | 337.768.495.273,58 | 100,00 | 479.716.888.141,02 |

| NO URUT | URAIAN | Reff | Anggaran 2017 (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) | % | Realisasi 2016 (Rp) |
|---------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 103 | | | | | | |
| 104 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.2 | | | | |
| 105 | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 39.007.999.999,04 | 39.007.999.999,04 | 100,00 | 8.578.900.000,00 |
| 107 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 7.020.000.000,00 | 7.020.000.000,00 | 100,00 | 7.020.000.000,00 |
| 110 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Pembayaran Pokok Hutang Pada Pihak Ketiga | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Jumlah Pengeluaran | | 46.027.999.999,04 | 46.027.999.999,04 | 100,00 | 15.598.900.000,00 |
| 118 | PEMBIAYAAN NETTO | | 291.740.495.274,54 | 291.740.495.274,54 | 100,00 | 464.117.988.141,02 |
| 119 | | | | | | |
| 120 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 5.1.3.3 | 0,00 | 417.658.961.348,00 | 100,00 | 337.768.495.273,58 |

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 22 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| No urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pendapatan Daerah | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 718.151.492.310,00 | 825.637.751.681,82 | 107.486.259.371,82 | 114,97 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 449.600.000.000,00 | 528.453.215.727,18 | 78.853.215.727,18 | 117,54 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 42.662.283.050,00 | 48.706.088.818,85 | 6.043.805.768,85 | 114,17 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 36.292.786.406,00 | 36.292.784.407,97 | (1.998,03) | 100,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 189.596.422.854,00 | 212.185.662.727,82 | 22.589.239.873,82 | 111,91 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1.468.851.401.000,00 | 1.416.428.331.296,00 | (52.423.069.704,00) | 96,43 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 69.963.565.000,00 | 60.499.721.072,00 | (9.463.843.928,00) | 86,47 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 996.492.454.000,00 | 996.492.454.000,00 | - | 100,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 321.539.572.000,00 | 278.580.346.224,00 | (42.959.225.776,00) | 86,64 |
| 1.2.4 | Dana Desa Dari APBN | 80.855.810.000,00 | 80.855.810.000,00 | - | 100,00 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 360.476.153.668,03 | 373.449.014.421,16 | 12.972.860.753,13 | 103,60 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 7.500.000.000,00 | 8.712.131.733,00 | 1.212.131.733,00 | 116,16 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 201.433.478.287,03 | 214.366.369.383,86 | 12.932.891.096,83 | 106,42 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 52.588.927.000,00 | 52.588.927.000,00 | - | 100,00 |
| 1.3.5 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 17.655.805.907,00 | 17.655.805.907,00 | - | 100,00 |
| 1.3.6 | Dana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau | - | - | - | - |
| 1.3.7 | Dana Penguatan DF dan PPD | - | - | - | - |
| 1.3.7 | Dana Bos | 81.297.942.474,00 | 80.125.780.397,30 | (1.172.162.076,70) | 98,56 |
| | Jumlah Pendapatan | 2.547.479.046.978,03 | 2.615.515.097.398,98 | 68.036.050.420,95 | 102,67 |
| 2 | Belanja Daerah | | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.486.783.848.821,05 | 1.299.646.259.688,98 | (187.137.589.132,07) | 87,41 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.118.022.565.652,42 | 950.142.604.624,18 | (167.879.961.028,24) | 84,98 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 2.678.741.220,00 | 2.358.580.867,00 | (320.160.353,00) | 88,05 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 48.689.637.300,00 | 47.965.959.800,00 | (723.677.500,00) | 98,51 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 44.730.823.005,80 | 34.694.686.100,00 | (10.036.136.905,80) | 77,56 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 50.436.628.305,00 | 48.747.897.642,00 | (1.688.730.663,00) | 96,65 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik | 216.460.229.892,80 | 214.565.611.722,80 | (1.894.618.170,00) | 99,12 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 5.765.223.445,03 | 1.170.918.933,00 | (4.594.304.512,03) | 20,31 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.352.435.693.431,52 | 1.189.950.371.638,54 | (162.485.321.792,98) | 87,99 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 185.467.270.715,20 | 178.352.823.667,00 | (7.114.447.048,20) | 96,16 |
| 2.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 707.304.077.839,86 | 630.970.493.075,82 | (76.333.584.764,04) | 89,21 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 459.664.344.876,46 | 380.627.054.895,72 | (79.037.289.980,74) | 82,81 |
| | Jumlah Belanja | 2.839.219.542.252,57 | 2.489.596.631.327,52 | (349.622.910.925,05) | 87,69 |
| | Surplus/(Defisit) | (291.740.495.274,54) | 125.918.466.071,46 | (165.822.029.203,08) | 43,16 |

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Pembiayaan Daerah | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 337.768.495.273,58 | 337.768.495.273,58 | - | 100.00 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 337.768.495.273,58 | 337.768.495.273,58 | - | 100.00 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | 0.00 |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | 0.00 |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | 0.00 |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | - | - | 0.00 |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | 0.00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 337.768.495.273,58 | 337.768.495.273,58 | - | 100.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 46.027.999.999,04 | 46.027.999.999,04 | - | 100.00 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | 0.00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 39.007.999.999,04 | 39.007.999.999,04 | - | 100.00 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 7.020.000.000,00 | 7.020.000.000,00 | - | 100.00 |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | 0.00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 46.027.999.999,04 | 46.027.999.999,04 | - | 100.00 |
| | Pembiayaan Netto | 291.740.495.274,54 | 291.740.495.274,54 | - | 100.00 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | - | 417.658.961.346,00 | 417.658.961.346,00 | 100.00 |



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

| NO URUT | URAIAN | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 556.250.000.000,00 | 596.559.264.609,83 | 107,25 | 528.453.215.727,18 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 42.758.400.850,00 | 47.760.996.920,00 | 111,70 | 48.706.088.818,85 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 34.507.634.576,00 | 34.654.443.121,29 | 100,43 | 36.292.784.407,97 |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | 187.555.732.316,63 | 215.298.256.906,73 | 114,79 | 212.185.662.727,82 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 821.071.767.742,63 | 894.272.961.557,85 | 108,92 | 825.637.751.681,82 |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | 75.172.479.000,00 | 49.971.819.548,00 | 66,48 | 59.964.467.682,00 |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 945.911.000,00 | 713.611.848,00 | 75,44 | 535.253.390,00 |
| 13 | Dana Alokasi Umum | 996.492.454.000,00 | 996.492.454.000,00 | 100,00 | 996.492.454.000,00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | 323.558.121.963,00 | 321.540.108.398,00 | 99,38 | 278.580.346.224,00 |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 1.396.168.965.963,00 | 1.368.717.993.794,00 | 98,03 | 1.335.572.521.296,00 |
| 16 | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dana Keistimewaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dana Penyesuaian | 132.687.698.000,00 | 132.687.698.000,00 | 100,00 | 133.444.737.000,00 |
| 21 | Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya | 132.687.698.000,00 | 132.687.698.000,00 | 100,00 | 133.444.737.000,00 |
| 22 | | | | | |
| 23 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 210.279.939.264,65 | 234.123.774.471,36 | 111,34 | 214.366.369.383,86 |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Pendapatan Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 210.279.939.264,65 | 234.123.774.471,36 | 111,34 | 214.366.369.383,86 |
| 28 | | | | | |
| 29 | BANTUAN KEUANGAN | | | | |
| 30 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi | 906.347.000,00 | 786.747.000,00 | 86,80 | 17.655.805.907,00 |
| 32 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Jumlah Bantuan Keuangan | 906.347.000,00 | 786.747.000,00 | 86,80 | 17.655.805.907,00 |
| 35 | Total Pendapatan Transfer | 1.740.042.950.227,65 | 1.736.316.213.265,36 | 99,79 | 1.701.039.433.586,86 |
| 36 | | | | | |
| 37 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 38 | Pendapatan Hibah | 80.283.302.299,00 | 82.204.905.633,00 | 102,39 | 8.712.131.733,00 |
| 39 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO URUT | URAIAN | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.125.780.397,30 |
| 41 | Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah | 80.283.302.299,00 | 82.204.905.633,00 | 102,39 | 88.837.912.130,30 |
| 42 | JUMLAH PENDAPATAN | 2.641.398.020.269,28 | 2.712.794.080.456,21 | 102,70 | 2.615.515.097.398,98 |
| 43 | | | | | |
| 44 | BELANJA | | | | |
| 45 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 46 | Belanja Pegawai | 1.288.464.045.146,56 | 1.136.436.322.475,00 | 88,20 | 1.128.501.908.291,18 |
| 47 | Belanja Barang dan Jasa | 709.638.938.542,80 | 632.023.010.894,75 | 89,06 | 596.840.719.109,82 |
| 48 | Bunga | 1.870.801.224,00 | 1.574.098.880,00 | 84,14 | 2.358.580.867,00 |
| 49 | Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Hibah | 91.368.532.085,00 | 87.536.588.786,75 | 95,81 | 82.089.253.766,00 |
| 51 | Bantuan Sosial | 34.340.000.000,00 | 29.112.937.900,00 | 84,78 | 34.694.686.100,00 |
| 52 | Jumlah Belanja Operasi | 2.125.682.316.998,36 | 1.886.682.958.936,50 | 88,76 | 1.844.485.148.134,00 |
| 53 | | | | | |
| 54 | BELANJA MODAL | | | | |
| 55 | Belanja Tanah | 37.026.932.088,00 | 23.968.613.921,26 | 64,73 | 24.499.277.856,00 |
| 56 | Belanja Peralatan dan Mesin | 109.534.340.870,00 | 103.267.579.893,95 | 94,28 | 78.491.177.590,53 |
| 57 | Belanja Gedung dan Bangunan | 98.361.635.249,00 | 86.964.485.418,53 | 88,41 | 121.377.512.878,19 |
| 58 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 183.990.415.156,00 | 154.464.420.371,00 | 83,95 | 119.460.878.630,00 |
| 59 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 47.987.105.016,00 | 42.647.304.963,82 | 88,87 | 36.798.207.941,00 |
| 60 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Jumlah Belanja Modal | 476.900.428.379,00 | 411.312.404.568,56 | 86,25 | 380.627.054.895,72 |
| 62 | | | | | |
| 63 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 64 | Belanja Tak Terduga | 12.588.782.337,92 | 135.692.298,00 | 1,08 | 1.170.918.933,00 |
| 65 | Jumlah Belanja Tak Terduga | 12.588.782.337,92 | 135.692.298,00 | 1,08 | 1.170.918.933,00 |
| 66 | Jumlah Belanja | 2.615.171.527.715,28 | 2.298.131.055.803,06 | 87,88 | 2.226.283.121.962,72 |
| 67 | | | | | |
| 68 | TRANSFER | | | | |
| 69 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | | | | |
| 70 | Bagi Hasil Pajak | 55.625.000.000,00 | 55.496.045.149,00 | 99,77 | 43.997.761.978,00 |
| 71 | Bagi Hasil Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750.135.664,00 |
| 72 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 6.075.840.085,00 | 5.708.186.187,00 | 93,95 | 0,00 |
| 73 | Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa | 61.700.840.085,00 | 61.204.231.336,00 | 99,20 | 48.747.897.642,00 |
| 74 | | | | | |
| 75 | TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN | | | | |
| 76 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 1.150.000.000,00 | 1.140.088.660,00 | 99,14 | 80.000.000,00 |
| 77 | Bantuan Keuangan ke Desa | 220.120.411.400,00 | 218.553.439.400,00 | 99,29 | 213.420.708.932,80 |
| 78 | Bantuan Keuangan Lainnya | 2.097.445.000,00 | 1.064.902.790,00 | 50,77 | 1.064.902.790,00 |
| 79 | Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan | 223.367.856.400,00 | 220.758.430.850,00 | 98,83 | 214.565.611.722,80 |
| 80 | Jumlah Transfer | 285.068.696.485,00 | 281.962.662.186,00 | 98,91 | 263.313.509.364,80 |
| 81 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 2.900.240.224.200,28 | 2.580.093.717.989,06 | 88,96 | 2.489.596.631.327,52 |
| 82 | | | | | |
| 83 | SURPLUS/DEFISIT | (258.842.203.931,00) | 132.700.362.467,15 | 51,27 | 125.918.466.071,46 |
| 84 | | | | | |
| 85 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 88 | Penggunaan SiLPA | 417.658.961.346,00 | 417.658.961.346,00 | 100,00 | 337.768.495.273,58 |
| 89 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO URUT | URAIAN | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Jumlah Penerimaan | 417.658.961.346,00 | 417.658.961.346,00 | 100,00 | 337.768.495.273,58 |
| 101 | | | | | |
| 102 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 103 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 151.796.757.415,00 | 140.296.757.415,00 | 92,42 | 39.007.999.999,04 |
| 105 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | 7.020.000.000,00 | 7.020.000.000,00 | 100,00 | 7.020.000.000,00 |
| 108 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Jumlah Pengeluaran | 158.816.757.415,00 | 147.316.757.415,00 | 92,76 | 46.027.999.999,04 |
| 116 | PEMBIAYAAN NETTO | 258.842.203.931,00 | 270.342.203.931,00 | 104,44 | 291.740.495.274,54 |
| 117 | | | | | |
| 118 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0,00 | 403.042.566.398,15 | 100,00 | 417.658.961.346,00 |



 Sleman,
 BUPATI SLEMAN,

 SRI PURNOMO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

| NO URUT | URAIAN | Anggaran 2019 | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 599.500.000.000,00 | 650.084.598.498,00 | 108,44 | 596.559.264.609,83 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 48.064.753.650,00 | 57.632.637.863,00 | 119,91 | 47.760.996.920,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 36.656.761.755,10 | 36.733.513.628,55 | 100,21 | 34.654.443.121,29 |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | 219.057.405.318,46 | 227.598.825.216,90 | 103,90 | 215.298.256.906,73 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 903.278.920.723,56 | 972.049.575.206,45 | 107,61 | 894.272.961.557,85 |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | 49.680.049.000,00 | 33.344.018.942,00 | 67,12 | 49.971.819.548,00 |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 986.563.000,00 | 591.937.800,00 | 60,00 | 713.611.848,00 |
| 13 | Dana Alokasi Umum | 1.035.921.414.000,00 | 1.035.862.077.000,00 | 99,99 | 996.492.454.000,00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | 310.281.644.450,00 | 301.566.940.583,00 | 97,19 | 321.540.108.398,00 |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 1.396.869.670.450,00 | 1.371.364.974.325,00 | 98,17 | 1.368.717.993.794,00 |
| 16 | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dana Keistimewaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dana Penyesuaian | 170.882.517.000,00 | 170.882.517.000,00 | 100,00 | 132.687.698.000,00 |
| 21 | Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya | 170.882.517.000,00 | 170.882.517.000,00 | 100,00 | 132.687.698.000,00 |
| 22 | | | | | |
| 23 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 223.594.065.727,06 | 243.660.619.272,00 | 108,97 | 234.123.774.471,36 |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Pendapatan Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 223.594.065.727,06 | 243.660.619.272,00 | 108,97 | 234.123.774.471,36 |
| 28 | | | | | |
| 29 | BANTUAN KEUANGAN | | | | |
| 30 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi | 2.319.000.000,00 | 2.319.000.000,00 | 100,00 | 786.747.000,00 |
| 32 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Jumlah Bantuan Keuangan | 2.319.000.000,00 | 2.319.000.000,00 | 100,00 | 786.747.000,00 |
| 35 | Total Pendapatan Transfer | 1.793.665.253.177,06 | 1.788.227.110.597,00 | 99,70 | 1.736.316.213.265,36 |
| 36 | | | | | |
| 37 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 38 | Pendapatan Hibah | 82.436.102.299,00 | 80.359.600.000,00 | 97,48 | 82.204.905.633,00 |
| 39 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah | 82.436.102.299,00 | 80.359.600.000,00 | 97,48 | 82.204.905.633,00 |

| NO URUT | URAIAN | Anggaran 2019 | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------|---|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | JUMLAH PENDAPATAN | 2.779.380.276.199,62 | 2.840.636.285.803,45 | 102,20 | 2.712.794.080.456,21 |
| 43 | | | | | |
| 44 | BELANJA | | | | |
| 45 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 46 | Belanja Pegawai | 1.298.168.928.691,76 | 1.164.335.455.521,34 | 89,69 | 1.136.436.322.475,00 |
| 47 | Belanja Barang dan Jasa | 757.934.821.313,68 | 680.788.247.219,18 | 89,82 | 632.023.010.894,75 |
| 48 | Bunga | 1.870.801.224,00 | 815.138.250,00 | 43,57 | 1.574.098.880,00 |
| 49 | Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Hibah | 113.493.309.700,00 | 110.760.813.362,34 | 97,59 | 87.536.588.786,75 |
| 51 | Bantuan Sosial | 32.386.900.000,00 | 29.342.042.220,00 | 90,60 | 29.112.937.900,00 |
| 52 | Jumlah Belanja Operasi | 2.203.854.760.929,44 | 1.986.041.696.572,86 | 90,12 | 1.886.682.958.936,50 |
| 53 | | | | | |
| 54 | BELANJA MODAL | | | | |
| 55 | Belanja Tanah | 42.125.477.800,00 | 34.642.524.703,00 | 82,24 | 23.968.613.921,26 |
| 56 | Belanja Peralatan dan Mesin | 157.961.485.012,55 | 140.484.888.534,89 | 88,94 | 103.267.579.893,95 |
| 57 | Belanja Gedung dan Bangunan | 128.260.218.961,24 | 80.879.857.866,98 | 63,06 | 86.964.485.418,53 |
| 58 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 187.299.770.605,00 | 158.949.146.965,09 | 84,86 | 154.464.420.371,00 |
| 59 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 42.949.108.195,00 | 36.574.942.787,51 | 85,16 | 42.647.304.963,82 |
| 60 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Jumlah Belanja Modal | 558.596.060.573,79 | 451.531.360.857,47 | 80,83 | 411.312.404.568,56 |
| 62 | | | | | |
| 63 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 64 | Belanja Tak Terduga | 6.079.780.276,54 | 271.125.000,00 | 4,46 | 135.692.298,00 |
| 65 | Jumlah Belanja Tak Terduga | 6.079.780.276,54 | 271.125.000,00 | 4,46 | 135.692.298,00 |
| 66 | Jumlah Belanja | 2.768.530.601.779,77 | 2.437.844.182.430,33 | 88,06 | 2.298.131.055.803,06 |
| 67 | | | | | |
| 68 | TRANSFER | | | | |
| 69 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | | | | |
| 70 | Bagi Hasil Pajak | 64.969.760.499,00 | 62.393.658.751,00 | 96,03 | 55.496.045.149,00 |
| 71 | Bagi Hasil Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 7.633.439.165,00 | 6.754.061.225,00 | 88,48 | 5.708.186.187,00 |
| 73 | Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa | 72.603.199.664,00 | 69.147.719.976,00 | 95,24 | 61.204.231.336,00 |
| 74 | | | | | |
| 75 | TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN | | | | |
| 76 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 1.245.000.000,00 | 792.971.390,00 | 63,69 | 1.140.088.660,00 |
| 77 | Bantuan Keuangan ke Desa | 267.660.968.264,00 | 267.521.493.614,00 | 99,95 | 218.553.439.400,00 |
| 78 | Bantuan Keuangan Lainnya | 2.347.072.890,00 | 1.689.001.912,49 | 71,96 | 1.064.902.790,00 |
| 79 | Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan | 271.253.041.154,00 | 270.003.466.916,49 | 99,54 | 220.758.430.850,00 |
| 80 | Jumlah Transfer | 343.856.240.818,00 | 339.151.186.892,49 | 98,63 | 281.962.662.186,00 |
| 81 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 3.112.386.842.597,77 | 2.776.995.369.322,82 | 89,22 | 2.580.093.717.989,06 |
| 82 | | | | | |
| 83 | SURPLUS/DEFISIT | (333.006.566.398,15) | 63.640.916.480,63 | 19,11 | 132.700.362.467,15 |
| 84 | | | | | |
| 85 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 88 | Penggunaan SiLPA | 403.042.566.398,15 | 403.042.566.398,15 | 100,00 | 417.658.961.346,00 |
| 89 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO URUT | URAIAN | Anggaran 2019 | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 93 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Jumlah Penerimaan | 403.042.566.398,15 | 403.042.566.398,15 | 100,00 | 417.658.961.346,00 |
| 101 | | | | | |
| 102 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 103 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 63.016.000.000,00 | 61.078.500.000,00 | 96,93 | 140.296.757.415,00 |
| 105 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | 7.020.000.000,00 | 7.020.000.000,00 | 100,00 | 7.020.000.000,00 |
| 108 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Jumlah Pengeluaran | 70.036.000.000,00 | 68.098.500.000,00 | 97,23 | 147.316.757.415,00 |
| 116 | PEMBIAYAAN NETTO | 333.006.566.398,15 | 334.944.066.398,15 | 100,58 | 270.342.203.931,00 |
| 117 | | | | | |
| 118 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0,00 | 398.584.982.878,78 | 100,00 | 403.042.566.398,15 |





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

| NO URUT | URAIAN | Reff | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.a | 398.571.000.000,00 | 499.961.975.136,00 | 125,44 | 650.084.598.498,00 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.b | 34.322.701.680,00 | 40.971.519.904,00 | 119,37 | 57.632.637.863,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.1.1.1.c | 48.708.429.946,93 | 47.565.772.690,28 | 97,65 | 36.733.513.628,55 |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.d | 195.141.808.395,00 | 199.747.474.697,45 | 102,36 | 227.598.825.216,90 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 676.743.940.021,93 | 788.246.742.427,73 | 116,48 | 972.049.575.206,45 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | 5.1.1.2.a | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.a.1 | 51.870.453.000,00 | 59.203.528.046,00 | 114,14 | 33.344.018.942,00 |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.a.2 | 1.423.226.000,00 | 796.215.469,00 | 55,94 | 591.937.800,00 |
| 13 | Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.a.3 | 947.130.689.000,00 | 938.351.449.000,00 | 99,07 | 1.035.862.077.000,00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.a.4 | 281.669.788.000,00 | 273.628.319.435,00 | 97,15 | 301.566.940.583,00 |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 1.282.094.156.000,00 | 1.271.979.511.950,00 | 99,21 | 1.371.364.974.325,00 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 5.1.1.2.b | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | 5.1.1.2.b.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dana Keistimewaan | 5.1.1.2.b.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dana Penyesuaian | 5.1.1.2.b.3 | 178.489.974.000,00 | 73.459.098.000,00 | 41,16 | 170.882.517.000,00 |
| 21 | Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya | | 178.489.974.000,00 | 73.459.098.000,00 | 41,16 | 170.882.517.000,00 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 5.1.1.2.c | | | | |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.c.1 | 214.969.938.143,57 | 223.286.778.345,00 | 103,87 | 243.660.619.272,00 |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 5.1.1.2.c.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Pendapatan Dana Otonomi Khusus | 5.1.1.2.c.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | | 214.969.938.143,57 | 223.286.778.345,00 | 103,87 | 243.660.619.272,00 |
| 28 | | | | | | |
| 29 | BANTUAN KEUANGAN | 5.1.1.2.d | | | | |
| 30 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat | 5.1.1.2.d.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.1.1.2.d.2 | 49.045.429.000,00 | 48.418.617.245,00 | 98,72 | 2.319.000.000,00 |
| 32 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten | 5.1.1.2.d.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota | 5.1.1.2.d.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Jumlah Bantuan Keuangan | | 49.045.429.000,00 | 48.418.617.245,00 | 98,72 | 2.319.000.000,00 |
| 35 | Total Pendapatan Transfer | | 1.724.599.497.143,57 | 1.617.144.005.540,00 | 93,77 | 1.788.227.110.597,00 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 5.1.1.3 | | | | |

| NO URUT | URAIAN | Ref | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | |
| 38 | Pendapatan Hibah | 5.1.1.3.1 | 137.022.224.944,50 | 135.660.122.645,00 | 99,01 | 80.359.600.000,00 |
| 39 | Pendapatan Dana Darurat | 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Pendapatan Lainnya | 5.1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah | | 137.022.224.944,50 | 135.660.122.645,00 | 99,01 | 80.359.600.000,00 |
| 42 | JUMLAH PENDAPATAN | | 2.538.365.662.110,00 | 2.541.050.870.612,73 | 100,11 | 2.840.636.285.803,45 |
| 43 | | | | | | |
| 44 | BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| 45 | BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | | | | |
| 46 | Belanja Pegawai | 5.1.2.1.a | 1.252.830.859.559,94 | 1.147.357.459.793,51 | 91,58 | 1.164.335.455.521,34 |
| 47 | Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.b | 667.331.411.443,55 | 597.782.876.331,94 | 89,58 | 680.788.247.219,18 |
| 48 | Bunga | 5.1.2.1.c | 140.675.922,00 | 89.787.135,00 | 63,83 | 815.138.250,00 |
| 49 | Subsidi | 5.1.2.1.d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Hibah | 5.1.2.1.e | 158.734.301.928,50 | 153.744.141.147,56 | 96,86 | 110.760.813.362,34 |
| 51 | Bantuan Sosial | 5.1.2.1.f | 64.839.000.000,00 | 53.395.042.950,00 | 82,35 | 29.342.042.220,00 |
| 52 | Jumlah Belanja Operasi | | 2.143.876.248.853,99 | 1.952.369.307.358,01 | 91,07 | 1.986.041.696.572,86 |
| 53 | | | | | | |
| 54 | BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | | | | |
| 55 | Belanja Tanah | 5.1.2.2.a | 57.225.465.000,00 | 45.182.640.674,00 | 78,96 | 34.642.524.703,00 |
| 56 | Belanja Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.b | 105.533.829.670,00 | 90.665.837.861,36 | 85,91 | 140.484.888.534,89 |
| 57 | Belanja Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.c | 152.034.197.369,00 | 148.407.029.489,42 | 97,61 | 80.879.857.866,98 |
| 58 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.d | 41.659.795.180,00 | 38.905.559.000,98 | 93,39 | 158.949.146.965,09 |
| 59 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.e | 40.870.695.186,13 | 37.905.701.065,82 | 92,75 | 36.574.942.787,51 |
| 60 | Belanja Aset Lainnya | 5.1.2.2.f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Jumlah Belanja Modal | | 397.323.982.405,13 | 361.066.768.091,58 | 90,87 | 451.531.360.857,47 |
| 62 | | | | | | |
| 63 | BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | | | | |
| 64 | Belanja Tak Terduga | 5.1.2.3.a | 57.685.938.292,66 | 20.161.477.613,00 | 34,95 | 271.125.000,00 |
| 65 | Jumlah Belanja Tak Terduga | | 57.685.938.292,66 | 20.161.477.613,00 | 34,95 | 271.125.000,00 |
| 66 | Jumlah Belanja | | 2.598.886.169.551,78 | 2.333.597.553.062,59 | 89,79 | 2.437.844.182.430,33 |
| 67 | | | | | | |
| 68 | TRANSFER | 5.1.2.4 | | | | |
| 69 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | 5.1.2.4.a | | | | |
| 70 | Bagi Hasil Pajak | 5.1.2.4.a.1 | 46.277.000.000,00 | 46.216.014.556,00 | 99,87 | 62.393.658.751,00 |
| 71 | Bagi Hasil Retribusi | 5.1.2.4.a.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 5.1.2.4.a.3 | 5.485.000.000,00 | 4.482.233.397,00 | 81,72 | 6.754.061.225,00 |
| 73 | Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa | | 51.762.000.000,00 | 50.698.247.953,00 | 97,94 | 69.147.719.976,00 |
| 74 | | | | | | |
| 75 | TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN | 5.1.2.4.b | | | | |
| 76 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 5.1.2.4.b.1 | 1.620.000.000,00 | 105.140.870,00 | 6,49 | 792.971.390,00 |
| 77 | Bantuan Keuangan ke Desa | 5.1.2.4.b.2 | 253.644.143.300,00 | 147.768.267.300,00 | 58,26 | 267.521.493.614,00 |
| 78 | Bantuan Keuangan Lainnya | 5.1.2.4.b.3 | 2.180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689.001.912,49 |
| 79 | Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan | | 257.444.143.300,00 | 147.873.408.170,00 | 57,44 | 270.003.466.916,49 |
| 80 | Jumlah Transfer | | 309.206.143.300,00 | 198.571.656.123,00 | 64,22 | 339.151.186.892,49 |
| 81 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | | 2.908.092.312.851,78 | 2.532.169.209.185,59 | 87,07 | 2.776.995.369.322,82 |
| 82 | | | | | | |
| 83 | SURPLUS/DEFISIT | 5.1.2.5 | (369.726.650.741,78) | 8.881.661.427,14 | 2,40 | 63.640.916.480,63 |
| 84 | | | | | | |
| 85 | PEMBIAYAAN | 5.1.3 | | | | |
| 86 | | | | | | |
| 87 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.1 | | | | |

| NO URUT | URAIAN | Reff | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------|--|---------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 88 | Penggunaan SILPA | | 398.584.982.878,78 | 398.584.982.878,78 | 100,00 | 403.042.566.398,15 |
| 89 | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Jumlah Penerimaan | | 398.584.982.878,78 | 398.584.982.878,78 | 100,00 | 403.042.566.398,15 |
| 101 | | | | | | |
| 102 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.2 | | | | |
| 103 | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 24.981.701.137,00 | 23.044.201.137,00 | 92,24 | 61.078.500.000,00 |
| 105 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 3.876.631.000,00 | 3.876.631.000,00 | 100,00 | 7.020.000.000,00 |
| 108 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Jumlah Pengeluaran | | 28.858.332.137,00 | 26.920.832.137,00 | 93,29 | 68.098.500.000,00 |
| 116 | PEMBIAYAAN NETTO | 5.1.3.3 | 369.726.650.741,78 | 371.664.150.741,78 | 100,52 | 334.944.066.398,15 |
| 117 | | | | | | |
| 118 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 5.1.4 | 0,00 | 380.545.812.168,92 | 100,00 | 398.584.982.878,78 |



 Sleman,
 BUPATI SLEMAN,
Kustini Sri Purnomo
 KUSTINI SRI PURNOMO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

| No Urut | Uraian | Reff | Anggaran | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.a | 488.190.000.000,00 | 511.407.257.119,00 | 104,76 | 499.961.975.136,00 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.b | 39.429.475.340,00 | 38.699.706.039,00 | 98,15 | 40.971.519.904,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.1.1.1.c | 38.726.973.911,00 | 38.164.197.265,08 | 98,55 | 47.565.772.690,28 |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.d | 204.328.574.200,00 | 215.408.198.296,00 | 105,42 | 199.747.474.697,45 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 770.675.023.451,00 | 803.679.358.719,08 | 104,28 | 788.246.742.427,73 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | | | | |
| 10 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | 5.1.1.2.a | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil | 5.1.1.2.a.1 | 47.587.894.000,00 | 71.907.299.430,00 | 151,10 | 59.999.743.515,00 |
| 12 | Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.a.2 | 925.964.507.000,00 | 925.964.567.000,00 | 100,00 | 938.351.449.000,00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 5.1.1.2.a.3 | 64.676.904.000,00 | 60.035.691.900,00 | 92,82 | 52.647.774.572,00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 5.1.1.2.a.4 | 310.728.965.956,00 | 308.701.084.849,00 | 99,35 | 220.980.544.863,00 |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 1.348.958.270.956,00 | 1.366.608.643.179,00 | 101,31 | 1.271.979.511.950,00 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 5.1.1.2.b | | | | |
| 18 | Dana Insentif Daerah | 5.1.1.2.b.1 | 36.985.385.000,00 | 36.985.385.000,00 | 100,00 | 73.459.098.000,00 |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | 5.1.1.2.b.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dana Keistimewaan | 5.1.1.2.b.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dana Desa | 5.1.1.2.b.4 | 110.556.360.000,00 | 110.556.360.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | 147.541.745.000,00 | 147.541.745.000,00 | 100,00 | 73.459.098.000,00 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 5.1.1.2.c | | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil | 5.1.1.2.c.1 | 199.084.687.853,00 | 233.854.622.951,00 | 117,46 | 223.286.778.345,00 |
| 26 | Bantuan Keuangan | 5.1.1.2.c.2 | 224.421.655.099,00 | 220.372.562.236,50 | 98,20 | 48.418.617.245,00 |
| 27 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | 423.506.342.952,00 | 454.227.185.187,50 | 107,25 | 271.705.395.590,00 |
| 28 | Total Pendapatan Transfer | | 1.920.006.358.908,00 | 1.968.377.573.366,50 | 102,52 | 1.617.144.005.540,00 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.1.1.3 | | | | |
| 31 | Pendapatan Hibah | 5.1.1.3.1 | 6.654.102.299,00 | 10.920.677.000,00 | 164,12 | 135.660.122.645,00 |
| 32 | Pendapatan Dana Darurat | 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Pendapatan Lainnya | 5.1.1.3.3 | 0,00 | 10.350.775.549,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | 6.654.102.299,00 | 21.271.452.549,00 | 319,67 | 135.660.122.645,00 |
| 35 | JUMLAH PENDAPATAN | | 2.697.335.484.658,00 | 2.793.328.384.634,58 | 103,56 | 2.541.050.870.612,73 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| 38 | BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | | | | |
| 39 | Belanja Pegawai | 5.1.2.1.a | 1.179.160.092.136,00 | 1.023.352.810.090,79 | 86,79 | 1.147.357.459.793,51 |
| 40 | Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.b | 942.731.487.459,01 | 809.140.794.285,79 | 85,83 | 597.782.876.331,94 |
| 41 | Belanja Bunga | 5.1.2.1.c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.787.135,00 |
| 42 | Belanja Subsidi | 5.1.2.1.d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No Urut | Uraian | Reff | Anggaran | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 43 | Belanja Hibah | 5.1.2.1.e | 106.058.125.234,00 | 98.348.312.974,13 | 92,73 | 153.744.141.147,56 |
| 44 | Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.1.f | 24.115.145.144,00 | 19.104.405.028,00 | 79,22 | 53.395.042.950,00 |
| 45 | Jumlah Belanja Operasi | | 2.252.064.849.973,01 | 1.949.946.322.378,71 | 86,58 | 1.952.369.307.358,01 |
| 46 | | | | | | |
| 47 | BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | | | | |
| 48 | Belanja Modal Tanah | 5.1.2.2.a | 204.822.813.324,00 | 201.823.474.555,00 | 98,54 | 45.182.640.674,00 |
| 49 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.b | 96.926.732.614,00 | 85.580.505.110,57 | 88,29 | 90.665.837.861,36 |
| 50 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.c | 40.257.369.750,00 | 37.993.884.789,85 | 94,38 | 148.407.029.489,42 |
| 51 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.d | 106.953.791.255,00 | 101.031.883.290,41 | 94,46 | 38.905.559.000,98 |
| 52 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.e | 8.148.232.030,00 | 7.220.158.135,00 | 88,61 | 37.905.701.065,82 |
| 53 | Belanja Modal Aset Lainnya | 5.1.2.2.f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Jumlah Belanja Modal | | 457.108.938.973,00 | 433.649.905.880,83 | 94,87 | 361.066.768.091,58 |
| 55 | | | | | | |
| 56 | BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | | | | |
| 57 | Belanja Tak Terduga | 5.1.2.3.a | 49.068.048.067,00 | 27.614.828.647,00 | 56,28 | 20.161.477.613,00 |
| 58 | Jumlah Belanja Tak Terduga | | 49.068.048.067,00 | 27.614.828.647,00 | 56,28 | 20.161.477.613,00 |
| 59 | | | | | | |
| 60 | BELANJA TRANSFER | 5.1.2.4 | | | | |
| 61 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa | 5.1.2.4.a | 58.135.536.263,00 | 56.636.670.393,00 | 97,42 | 50.698.247.953,00 |
| 62 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | 5.1.2.4.b | 292.469.800,00 | 292.469.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 63 | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | 5.1.2.4.c | 119.957.190,00 | 119.957.190,00 | 100,00 | 105.140.870,00 |
| 64 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 5.1.2.4.d | 247.002.744.460,00 | 246.052.744.250,00 | 99,62 | 147.768.267.300,00 |
| 65 | Jumlah Belanja Transfer | | 305.550.707.713,00 | 303.101.841.633,00 | 99,20 | 198.571.656.123,00 |
| 66 | JUMLAH BELANJA | | 3.063.792.544.726,01 | 2.714.312.898.539,54 | 88,59 | 2.532.169.209.185,59 |
| 67 | | | | | | |
| 68 | SURPLUS/DEFISIT | 5.1.2.5 | (366.457.060.068,01) | 79.015.486.095,04 | 21,56 | 8.881.661.427,14 |
| 69 | | | | | | |
| 70 | PEMBIAYAAN | 5.1.3 | | | | |
| 71 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.1 | | | | |
| 72 | Penggunaan SiLPA | | 380.553.060.068,01 | 380.545.812.168,92 | 100,00 | 398.584.982.878,78 |
| 73 | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | 380.553.060.068,01 | 380.545.812.168,92 | 100,00 | 398.584.982.878,78 |
| 83 | | | | | | |
| 84 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.2 | | | | |
| 85 | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 14.096.000.000,00 | 14.096.000.000,00 | 100,00 | 23.044.201.137,00 |
| 87 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876.631.000,00 |
| 90 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No Urut | Uraian | Reff | Anggaran | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------|---|---------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 91 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Pemberian Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | 14.096.000.000,00 | 14.096.000.000,00 | 100,00 | 26.920.832.137,00 |
| 95 | PEMBIAYAAN NETTO | 5.1.3.3 | 366.457.060.068,01 | 366.449.812.168,92 | 100,00 | 371.664.150.741,78 |
| 96 | | | | | | |
| 97 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 5.1.4 | 0,00 | 445.465.298.263,96 | 100,00 | 380.545.812.168,92 |



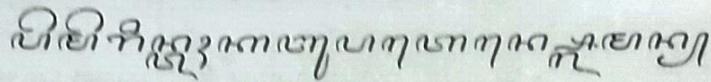
Sleman, 09 Maret 2022

BUPATI SLEMAN

Kustini Sri Purnomo
KUSTINI SRI PURNOMO

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 24 Mei 2023

KABUPATEN SLEMAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No Urut | Uralan | Reff | Anggaran | Realisasi 2022 | % | Realisasi 2021 |
|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.a | 752.820.000.000,00 | 763.128.648.846,40 | 101,37 | 511.407.257.119,00 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.b | 31.281.454.085,00 | 40.435.638.852,00 | 129,26 | 38.699.706.039,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.1.1.1.c | 38.657.466.216,00 | 38.866.059.319,80 | 100,54 | 38.164.197.265,08 |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.d | 208.391.920.095,00 | 218.634.456.638,20 | 104,92 | 215.408.198.296,00 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 1.031.150.840.396,00 | 1.061.064.803.656,40 | 102,90 | 803.679.358.719,08 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | | | | |
| 10 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | 5.1.1.2.a | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil | 5.1.1.2.a.1 | 52.115.759.000,00 | 58.936.142.582,00 | 113,09 | 71.907.299.430,00 |
| 12 | Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.a.2 | 921.526.948.280,00 | 921.381.948.280,00 | 99,98 | 925.964.567.000,00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 5.1.1.2.a.3 | 117.775.795.430,00 | 109.181.637.689,00 | 92,70 | 60.035.691.900,00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 5.1.1.2.a.4 | 339.183.283.379,00 | 321.588.047.700,00 | 94,81 | 308.701.084.849,00 |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 1.430.601.786.089,00 | 1.411.087.776.251,00 | 98,64 | 1.366.608.643.179,00 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 5.1.1.2.b | | | | |
| 18 | Dana Insentif Daerah | 5.1.1.2.b.1 | 33.641.577.000,00 | 33.641.577.000,00 | 100,00 | 36.985.385.000,00 |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | 5.1.1.2.b.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dana Keistimewaan | 5.1.1.2.b.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dana Desa | 5.1.1.2.b.4 | 105.499.075.000,00 | 105.499.075.000,00 | 100,00 | 110.556.360.000,00 |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | 139.140.652.000,00 | 139.140.652.000,00 | 100,00 | 147.541.745.000,00 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 5.1.1.2.c | | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil | 5.1.1.2.c.1 | 246.410.139.877,00 | 273.790.596.558,00 | 111,11 | 233.854.622.951,00 |
| 26 | Bantuan Keuangan | 5.1.1.2.c.2 | 119.788.018.095,00 | 114.588.467.658,44 | 95,66 | 220.372.562.236,50 |
| 27 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | 366.198.157.972,00 | 388.379.064.216,44 | 106,06 | 454.227.185.187,50 |
| 28 | Total Pendapatan Transfer | | 1.935.940.596.061,00 | 1.938.607.492.467,44 | 100,14 | 1.968.377.573.366,50 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.1.1.3 | | | | |
| 31 | Pendapatan Hibah | 5.1.1.3.1 | 6.654.102.299,00 | 6.307.858.939,00 | 94,80 | 10.920.677.000,00 |
| 32 | Pendapatan Dana Darurat | 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Pendapatan Lainnya | 5.1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350.775.549,00 |
| 34 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | 6.654.102.299,00 | 6.307.858.939,00 | 94,80 | 21.271.452.549,00 |
| 35 | JUMLAH PENDAPATAN | | 2.973.745.538.756,00 | 3.005.980.155.062,84 | 101,08 | 2.793.328.384.634,58 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| 38 | BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | | | | |
| 39 | Belanja Pegawai | 5.1.2.1.a | 1.175.154.147.373,00 | 1.088.278.763.328,05 | 92,61 | 1.023.352.810.090,79 |
| 40 | Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.b | 985.774.908.899,54 | 892.765.612.003,69 | 90,56 | 809.140.794.285,79 |
| 41 | Belanja Bunga | 5.1.2.1.c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No Urut | Uraian | Reff | Anggaran | Realisasi 2022 | % | Realisasi 2021 |
|---------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 42 | Belanja Subsidi | 5.1.2.1.d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Belanja Hibah | 5.1.2.1.e | 187.767.022.019,00 | 185.010.639.932,55 | 98,53 | 98.348.312.974,13 |
| 44 | Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.1.f | 34.207.660.000,00 | 29.736.550.130,00 | 86,93 | 19.104.405.028,00 |
| 45 | Jumlah Belanja Operasi | | 2.382.903.738.291,54 | 2.195.791.565.394,29 | 92,15 | 1.949.946.322.378,71 |
| 46 | | | | | | |
| 47 | BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | | | | |
| 48 | Belanja Modal Tanah | 5.1.2.2.a | 123.100.320.356,00 | 111.481.139.540,00 | 90,56 | 201.823.474.555,00 |
| 49 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.b | 112.700.178.350,00 | 97.864.713.402,54 | 86,84 | 85.580.505.110,57 |
| 50 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.c | 118.608.047.320,00 | 113.373.486.914,89 | 95,59 | 37.993.884.789,85 |
| 51 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.d | 138.784.445.782,00 | 134.596.794.635,03 | 96,98 | 101.031.883.290,41 |
| 52 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.e | 9.484.531.209,00 | 9.127.775.158,00 | 96,24 | 7.220.158.135,00 |
| 53 | Belanja Modal Aset Lainnya | 5.1.2.2.f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Jumlah Belanja Modal | | 502.677.523.017,00 | 466.443.909.650,46 | 92,79 | 433.649.905.880,83 |
| 55 | | | | | | |
| 56 | BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | | | | |
| 57 | Belanja Tak Terduga | 5.1.2.3.a | 43.075.302.001,01 | 18.234.059.538,00 | 42,33 | 27.614.828.647,00 |
| 58 | Jumlah Belanja Tak Terduga | | 43.075.302.001,01 | 18.234.059.538,00 | 42,33 | 27.614.828.647,00 |
| 59 | | | | | | |
| 60 | BELANJA TRANSFER | 5.1.2.4 | | | | |
| 61 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa | 5.1.2.4.a | 82.240.290.458,00 | 78.328.209.068,00 | 95,24 | 56.636.670.393,00 |
| 62 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | 5.1.2.4.b | 916.696.000,00 | 913.031.000,00 | 99,60 | 292.469.800,00 |
| 63 | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | 5.1.2.4.c | 135.000.000,00 | 133.034.510,00 | 98,54 | 119.957.190,00 |
| 64 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 5.1.2.4.d | 282.326.287.253,00 | 280.630.317.595,00 | 99,40 | 246.052.744.250,00 |
| 65 | Jumlah Belanja Transfer | | 365.618.273.711,00 | 360.004.592.173,00 | 98,46 | 303.101.841.633,00 |
| 66 | JUMLAH BELANJA | | 3.294.274.837.020,55 | 3.040.474.126.755,75 | 92,30 | 2.714.312.898.539,54 |
| 67 | | | | | | |
| 68 | SURPLUS/DEFISIT | 5.1.2.5 | (320.529.298.264,55) | (34.493.971.692,91) | 10,76 | 79.015.486.095,04 |
| 69 | | | | | | |
| 70 | PEMBIAYAAN | 5.1.3 | | | | |
| 71 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.1 | | | | |
| 72 | Penggunaan SiLPA | | 445.465.298.264,55 | 445.465.298.263,96 | 100,00 | 380.545.812.168,92 |
| 73 | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | 445.465.298.264,55 | 445.465.298.263,96 | 100,00 | 380.545.812.168,92 |
| 83 | | | | | | |
| 84 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.2 | | | | |
| 85 | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 124.936.000.000,00 | 124.936.000.000,00 | 100,00 | 14.096.000.000,00 |
| 87 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dicetak oleh SIKD

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

| No Urut | Uraian | Reff | Anggaran | Realisasi 2022 | % | Realisasi 2021 |
|---------|---|---------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 90 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Pemberian Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | 124.936.000.000,00 | 124.936.000.000,00 | 100,00 | 14.096.000.000,00 |
| 95 | PEMBIAYAAN NETTO | 5.1.3.3 | 320.529.298.264,55 | 320.529.298.263,96 | 100,00 | 366.449.812.168,92 |
| 96 | | | | | | |
| 97 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 5.1.4 | 0,00 | 286.035.326.571,05 | 100,00 | 445.465.298.263,96 |


 BUPATI SLEMAN,
Abmniker
KRISTINI SRI PURNOMO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| No Urut | Uraian | Reff | Anggaran | Realisasi 2023 | % | Realisasi 2022 |
|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.a | 782.223.000.000,00 | 833.220.962.563,00 | 106,52 | 763.128.648.846,40 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.b | 37.979.266.150,00 | 41.791.670.858,00 | 110,04 | 40.435.638.852,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.1.1.1.c | 39.811.758.078,00 | 38.698.020.699,57 | 97,20 | 38.866.059.319,80 |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.d | 228.920.390.516,00 | 216.447.206.120,02 | 94,55 | 218.634.456.638,20 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 1.088.934.414.744,00 | 1.130.157.860.240,59 | 103,79 | 1.061.064.803.656,40 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | | | | |
| 10 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | 5.1.1.2.a | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil | 5.1.1.2.a.1 | 56.925.750.896,00 | 63.146.898.548,00 | 110,93 | 58.936.142.582,00 |
| 12 | Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.a.2 | 958.373.327.000,00 | 971.708.817.535,00 | 101,39 | 921.381.948.280,00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 5.1.1.2.a.3 | 24.540.261.000,00 | 23.251.738.208,00 | 94,75 | 109.181.637.689,00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 5.1.1.2.a.4 | 342.903.904.592,00 | 341.904.619.490,00 | 99,71 | 321.588.047.700,00 |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 1.382.743.243.488,00 | 1.400.012.073.781,00 | 101,25 | 1.411.087.776.251,00 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 5.1.1.2.b | | | | |
| 18 | Dana Insentif Daerah | 5.1.1.2.b.1 | 48.593.705.000,00 | 48.593.705.000,00 | 100,00 | 33.641.577.000,00 |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | 5.1.1.2.b.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dana Keistimewaan | 5.1.1.2.b.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dana Desa | 5.1.1.2.b.4 | 124.417.337.000,00 | 124.203.563.500,00 | 99,83 | 105.499.075.000,00 |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | 173.011.042.000,00 | 172.797.268.500,00 | 99,88 | 139.140.652.000,00 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 5.1.1.2.c | | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil | 5.1.1.2.c.1 | 287.856.631.411,00 | 294.692.668.839,00 | 102,37 | 273.790.596.558,00 |
| 26 | Bantuan Keuangan | 5.1.1.2.c.2 | 77.482.969.660,00 | 76.428.471.158,88 | 98,64 | 114.588.467.658,44 |
| 27 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | 365.339.601.071,00 | 371.121.139.997,88 | 101,58 | 388.379.064.216,44 |
| 28 | Total Pendapatan Transfer | | 1.921.093.886.559,00 | 1.943.930.482.278,88 | 101,19 | 1.938.607.492.467,44 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.1.1.3 | | | | |
| 31 | Pendapatan Hibah | 5.1.1.3.1 | 10.244.138.000,00 | 9.524.649.805,00 | 92,98 | 6.307.858.939,00 |
| 32 | Pendapatan Dana Darurat | 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Pendapatan Lainnya | 5.1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | 10.244.138.000,00 | 9.524.649.805,00 | 92,98 | 6.307.858.939,00 |
| 35 | JUMLAH PENDAPATAN | | 3.020.272.439.303,00 | 3.083.612.992.324,47 | 102,10 | 3.005.980.155.062,84 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| 38 | BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | | | | |
| 39 | Belanja Pegawai | 5.1.2.1.a | 1.136.131.274.687,00 | 1.069.357.083.000,06 | 94,12 | 1.088.278.763.328,05 |
| 40 | Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.b | 1.015.306.812.178,00 | 950.844.478.030,46 | 93,65 | 892.765.612.003,69 |
| 41 | Belanja Bunga | 5.1.2.1.c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Belanja Subsidi | 5.1.2.1.d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No Urut | Uraian | Reff | Anggaran | Realisasi 2023 | % | Realisasi 2022 |
|---------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 43 | Belanja Hibah | 5.1.2.1.e | 230.226.325.037,00 | 227.746.360.238,96 | 98,92 | 185.010.639.932,55 |
| 44 | Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.1.f | 39.661.960.082,00 | 36.999.961.619,20 | 93,29 | 29.736.550.130,00 |
| 45 | Jumlah Belanja Operasi | | 2.421.326.371.984,00 | 2.284.947.882.888,68 | 94,37 | 2.195.791.565.394,29 |
| 46 | | | | | | |
| 47 | BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | | | | |
| 48 | Belanja Modal Tanah | 5.1.2.2.a | 2.114.059.145,00 | 888.335.348,00 | 42,02 | 111.481.139.540,00 |
| 49 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.b | 84.918.055.691,00 | 76.719.104.313,63 | 90,34 | 97.864.713.402,54 |
| 50 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.c | 133.606.763.355,00 | 129.856.087.326,89 | 97,19 | 113.373.486.914,89 |
| 51 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.d | 133.957.122.317,00 | 132.210.788.643,57 | 98,70 | 134.596.794.635,03 |
| 52 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.e | 10.159.946.850,00 | 7.911.292.566,00 | 77,87 | 9.127.775.158,00 |
| 53 | Belanja Modal Aset Lainnya | 5.1.2.2.f | 1.109.264.000,00 | 690.838.122,00 | 62,28 | 0,00 |
| 54 | Jumlah Belanja Modal | | 365.865.211.358,00 | 348.276.446.320,09 | 95,19 | 466.443.909.650,46 |
| 55 | | | | | | |
| 56 | BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | | | | |
| 57 | Belanja Tak Terduga | 5.1.2.3.a | 25.063.948.455,00 | 14.593.248.470,00 | 58,22 | 18.234.059.538,00 |
| 58 | Jumlah Belanja Tak Terduga | | 25.063.948.455,00 | 14.593.248.470,00 | 58,22 | 18.234.059.538,00 |
| 59 | | | | | | |
| 60 | BELANJA TRANSFER | 5.1.2.4 | | | | |
| 61 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa | 5.1.2.4.a | 83.793.804.407,00 | 80.340.459.980,00 | 95,88 | 78.328.209.068,00 |
| 62 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | 5.1.2.4.b | 170.000.000,00 | 168.105.000,00 | 98,89 | 913.031.000,00 |
| 63 | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | 5.1.2.4.c | 131.696.000,00 | 123.923.420,00 | 94,10 | 133.034.510,00 |
| 64 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 5.1.2.4.d | 384.956.733.670,00 | 384.255.742.955,00 | 99,82 | 280.630.317.595,00 |
| 65 | Jumlah Belanja Transfer | | 469.052.234.077,00 | 464.888.231.355,00 | 99,11 | 360.004.592.173,00 |
| 66 | JUMLAH BELANJA | | 3.281.307.765.874,00 | 3.112.705.809.033,77 | 94,86 | 3.040.474.126.755,75 |
| 67 | | | | | | |
| 68 | SURPLUS/DEFISIT | 5.1.2.5 | (261.035.326.571,00) | (29.092.816.709,30) | 11,15 | (34.493.971.692,91) |
| 69 | | | | | | |
| 70 | PEMBIAYAAN | 5.1.3 | | | | |
| 71 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.1 | | | | |
| 72 | Penggunaan SiLPA | | 286.035.326.571,00 | 286.035.326.571,05 | 100,00 | 445.465.298.263,96 |
| 73 | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | 286.035.326.571,00 | 286.035.326.571,05 | 100,00 | 445.465.298.263,96 |
| 83 | | | | | | |
| 84 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.2 | | | | |
| 85 | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 100,00 | 124.936.000.000,00 |
| 87 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No Urut | Uraian | Reff | Anggaran | Realisasi 2023 | % | Realisasi 2022 |
|---------|---|---------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 91 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Pemberian Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 100,00 | 124.936.000.000,00 |
| 95 | PEMBIAYAAN NETTO | 5.1.3.3 | 261.035.326.571,00 | 261.035.326.571,05 | 100,00 | 320.529.298.263,96 |
| 96 | | | | | | |
| 97 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 5.1.4 | 0,00 | 231.942.509.861,75 | 100,00 | 286.035.326.571,05 |



TUGAS AKHIR final - Kintan Aulia.pdf

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pdfcoffee.com
Internet Source

2%

2

repository.usd.ac.id
Internet Source

1%

3

www.scribd.com
Internet Source

1%

4

www.swaraarum.com
Internet Source

1%

5

adoc.pub
Internet Source

1%

6

estinationsih.staff.gunadarma.ac.id
Internet Source

1%

7

eprints.poltekykpn.ac.id
Internet Source

1%

8

www.pelajaran.co.id
Internet Source

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025 . Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Kintan Aulia Dewinta Sari
NIM : 2022125749
Prodi : Diploma Tiga Akuntansi
Judul TA : Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
Periode 2017 - 2023

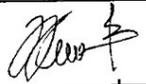
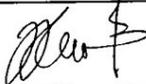
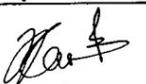
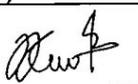
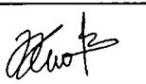
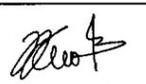
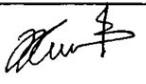
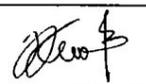
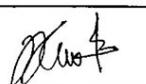
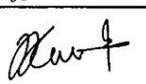
Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 8 %.
Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025


Kabag. Perpustakaan
Maryadi, A.Md.

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

| | |
|------------------|--|
| Dosen pembimbing | : Djaja Perdana, S.Psi., S.E., M.T. |
| Nama Mahasiswa | : KINTAN AULIA DEWINTA SARI |
| Nomor Mahasiswa | : 2022125749 |
| Judul TA | : Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Periode 2017 - 2023 |

| No | Hari | Tanggal | Materi Bimbingan | Td. Tangan Mhs. |
|----|--------|-----------|-------------------------|---|
| 1 | Kamis | 13/3 2025 | Bimbingan awal |  |
| 2 | Kamis | 10/4 2025 | Pembahasan topik BAB I |  |
| 3 | Kamis | 24/4 2025 | Revisi BAB I |  |
| 4 | Selasa | 29/4 2025 | Konsultasi BAB I |  |
| 5 | Kamis | 8/5 2025 | BAB I lanjut BAB II |  |
| 6 | Kamis | 19/6 2025 | Revisi BAB III |  |
| 7 | Kamis | 26/6 2025 | Revisi BAB III |  |
| 8 | Jumat | 11/7 2025 | Revisi BAB IV |  |
| 9 | Senin | 21/7 2025 | Revisi BAB IV dan BAB V |  |
| 10 | Kamis | 24/7 2025 | Konsultasi final |  |

Dosen Pembimbing,



Djaja Perdana, S.Psi., S.E., M.T.,

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Dr. Nung Harjanto., S.E., M.A.A.C., Ak., CA

